

**IMPLEMENTASI DISTRIBUSI BANTUAN SOSIAL (RASKIN)
BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KELURAHAN BONTOALA
PARANG KECAMATAN BONTOALA KOTA MAKASSAR**



SKRIPSI

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

SARMILA

4517021018

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

UNIVERSITAS BOSOWA

2021

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sarmila
Nim : 4517021018
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Bosowa
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : Implemtasi Distribusi Bantuan Sosial (RASKIN) Bagi Masyarakat Miskin Di kelurahan Bontoala Parang Kecamatan Bontoala Kota Makassar.

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri bukan dari orang lain, baik sebagian ataupun seluruhnya, pendapat ahli dan rujukan lain (penelitian sebelumnya, dan jurnal terdahulu) ini di kutip atau dirujuk berdasarkan Kode Etik Ilmiah.

Apabila karya ilmiah atau penulis skripsi ini terbukti merupakan duplikat ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain atau dengan sengaja mengajukan karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan saksi hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagai pertanggung jawaban ilmiah tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.

Makassar, 24 September 2021

Penulis,



Sarmila

4517021018

HALAMAN PENGESAHAN

IMPLEMENTASI DISTRIBUSI BANTUAN SOSIAL (RASKIN) BAGI
MASYARAKAT MISKIN DI KELURAHAN BONTOALA PARANG
KECAMATAN BONTOALA KOTA MAKASSAR

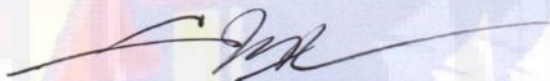
SARMILA
4517021018

Makassar, 24 Agustus 2021

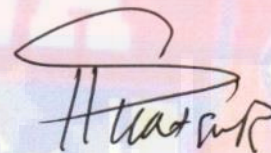
Menyetujui;

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Uddin B. Sore, S.H., S.IP., M. Si.
NIDN. 0906016701




Drs. Natsir Tompo, M.Si.
NIDN. 0904046601

Mengetahui,

Dekan FISIP
Universitas Bosowa Makassar


Arief Wicaksono, S.IP., MA
NIDN: 0927117602

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Negara


Nings Haslinda Zainal, S. Sos., M. Si.
NIDN. 0915098603

HALAMAN PENERIMAAN

Pada Hari Selasa, Tanggal Dua Puluh Empat Agustus Dua Ribu Dua Puluh Satu,
Dengan Judul Skripsi **IMPLEMENTASI BANTUAN SOSIAL (RASKIN)
BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KELURAHAN BONTOALA PARANG
KECAMATAN BONTOALA KOTA MAKASSAR**

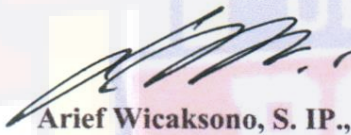
Nama : Sarmila
No. Stambuk : 4517021018
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

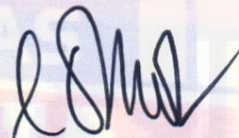
Telah diterima oleh panitia ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Bosowa Makassar untuk memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar sarjana (S1) pada program studi Ilmu Administrasi Negara.

Panitia Ujian

Ketua

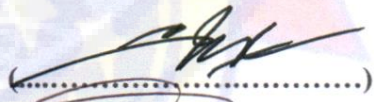
Sekretaris


Arief Wicaksono, S. IP., M.A.

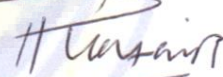

Nining Haslinda Zainal, S.Sos., M. Si.

Tim Penguji Skripsi

1. Dr. Uddin B. Sore, S.H., S.IP., M. Si.


(.....)

2. Drs. Natsir Tompo, M.Si.


(.....)

3. Dr. Drs. Syamsuddin Maldun, M.Pd.


(.....)

4. Dr. Dra. Nurkaidah, M.M.


(.....)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat serta pengikutnya. Penulisan proposal berjudul “Implementasi Distribusi Bantuan Sosial Masyarakat Miskin Kelurahan Bontoala Parang Kecamatan Bontoala Kota Makassar”, ini merupakan syarat bagi penulis untuk melaksanakan penelitian dalam penyusunan skripsi pada program studi Ilmu Administrasi Negara.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, masih terdapat kesalahan atau kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap proposal ini, agar dapat bermanfaat di kemudian hari.

Skripsi ini dapat terselesaikan, tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang yang saya sayangi yaitu orang tua penulis yakni bapak Surulla dan mama Salmiah yang selalu memberikan dukungan serta doa yang selalu dipanjatkan untuk anaknya, terima kasih atas didikannya selama ini, kasih sayang yang tidak pernah

berhenti dan semangat yang selalu di berikan untuk anaknya sehingga bisa sampai di titik ini. Sekali lagi terima kasih bapak dan mama.

2. Prof. Dr. Muhammad Saleh Pallu, M. Eng selaku rektor Universitas Bosowa Makassar
3. Arief Wicaksono, SIP, MA selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
4. Nining Haslindah Zainal, S.Sos.,M.Si selaku Ketua Prodi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa
5. Dr. Uddin B. Sore, SH., S.IP., M.Si selaku pembimbing 1 dan Drs. Natsir Tompo, M.Si selaku pembimbing 2 yang selalu bijaksana memberikan bimbingan, nasehat serta waktunya selama proses pembimbingan proposal.
6. Segenap bapak dan ibu dosen yang telah membantu penulis selama penyusunan proposal ini.
7. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada diriku yang sudah berjuang sampai di titik ini jangan pantang menyerah yah harus tetap berjuang sampai sukses aamiin.
8. Saudara-saudari yang ada di grup ADM A (KECE) yang selalu ada dalam suka dan duka selama saya berkuliah di Universitas Bosowa.
9. Seluruh sahabat group “C’bar”, “Cicoku”, dan group “Dirumahaja” atas dukungan, doa dan semangat yang telah di berikan kepada penulis.
10. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk pak budi yang selalu membantu saya dalam urusan administrasi di fakultas dan ibu mega yang membantu

saya mengurus biaya-biaya kampus selama saya kuliah sekali lagi terima kasih pak dan bu.

11. Keluarga besar BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Keluarga Besar HIMAN (Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara) yang telah memberikan bantuan, semangat, doa, serta menjadi wadah bagi penulis dalam proses dan belajar.
12. Saudara-saudari Prodi Administrasi Negara angkatan 17.
13. Saudara-saudara menjadi sahabat senasib dan seperjuangan penulis yaitu PRAKSIS 2017.

Serta kepada semua insan yang tercipta dan pernah bersentuhan dengan jalan hidupku. Kata maaf dan ucapan terima kasih yang tak terkira atas semuanya. Sekecil apapun perkenalan itu dari garis hidupku, sungguh suatu hal yang amat sangat luar biasa bagi penulis diatas segalanya, kepada Allah SWT yang telah mendatangkan mereka dalam kehidupan saya.

Makassar, 24 Agustus 2021

Penulis

Sarmila

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	II
HALAMAN PENGESAHAN	III
HALAMAN PENERIMAAN	IV
KATA PENGANTAR	V
DAFTAR ISI.....	VIII
DAFTAR GAMBAR	XI
DAFTAR TABEL.....	XII
DAFTAR LAMPIRAN	XIII
DAFTAR SINGKATAN	XIV
ABSTRAK	XV
ABSTRACT	XVI
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Batasan dan Rumusan Masalah.....	6
1.2.1 Batasan Masalah	6
1.2.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.3.1 Tujuan Penelitian	7
1.3.2 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Konsep Implementasi Kebijakan	9
2.1.1 Pengertian implementasi.....	9
2.1.2 Teori Implementasi Kebijakan	13
2.1.3 Tahapan Implementasi Kebijakan	16
2.1.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembuatan Kebijakan.....	17
2.2 Konsep Distribusi	19
2.2.1 Pengertian Distribusi	19
2.2.2 Tujuan dan Fungsi Pokok Distribusi	24
2.2.3 Indikator Distribusi	26
2.2.4 Sistem Distribusi.....	27

2.3 Konsep Efektivitas	27
2.3.1 Pengertian Efektivitas.....	27
2.3.2 Indikator Efektivitas	28
2.4 Konsep Bantuan Sosial	29
2.5 Konsep Kemiskinan	30
2.5.1 Pengetian Kemiskinan	30
2.5.2 Faktor Penyebab Kemiskinan	31
2.6 Konsep Beras Miskin (RASKIN).....	32
2.7 Penelitian Terdahulu	36
2.8 Kerangka Konseptual	40
BAB III METODE PENELITIAN	43
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	43
3.2 Lokasi Penelitian.....	44
3.3. Deskripsi Fokus dan Indikator Penelitian.....	44
3.4.Sumber Data Penelitian.....	46
3.3.1 Data Primer.....	46
3.3.2 Data Sekunder.....	47
3.5 Informan Penelitian.....	48
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	48
3.6.1 Observasi	48
3.6.2 Wawancara	49
3.6.3 Dokumentasi	50
3.7 Teknik Keabsahan Data	50
3.7.1 <i>Credibility</i> (derajat kepercayaan)	51
3.7.2 <i>Transferability</i> (keteralihan).....	53
3.7.3 <i>Dependability</i> (kebergantungan)	53
3.7.4 <i>Confirmability</i> (kepastian).....	53
3.8 Teknik Analisis Data.....	54
3.8.1 Pengumpulan Data.....	55
3.8.2 Reduksi Data.....	55
3.8.3 Sajian Data.....	56
3.8.4 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data.....	56
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.....	58
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	58
4.1.1 Profil Kota Makassar	58
4.1.2 Kecamatan Bontoala.....	59
4.1.3 Kelurahan Bontoala Parang	63
4.2 Hasil Penelitian	65
4.2.1 Proses distribusi bantuan sosial (RASKIN) bagi masyarakat miskin di Kelurahan Bontoala Parang Kecamatan Bontoala Kota Makassar.....	66
4.2.2 Efektifitas Pelaksanaan Distribusi Bantuan Sosial (RASKIN) Bagi Masyarakat Miskin di Kelurahan Bontoala Parang Kecamatan Bontoala Kota Makassar	80

BAB V PENUTUP **98**
5.1 Kesimpulan 98
5.2 Saran..... 99

DAFTAR PUSTAKA **100**



DAFTAR GAMBAR

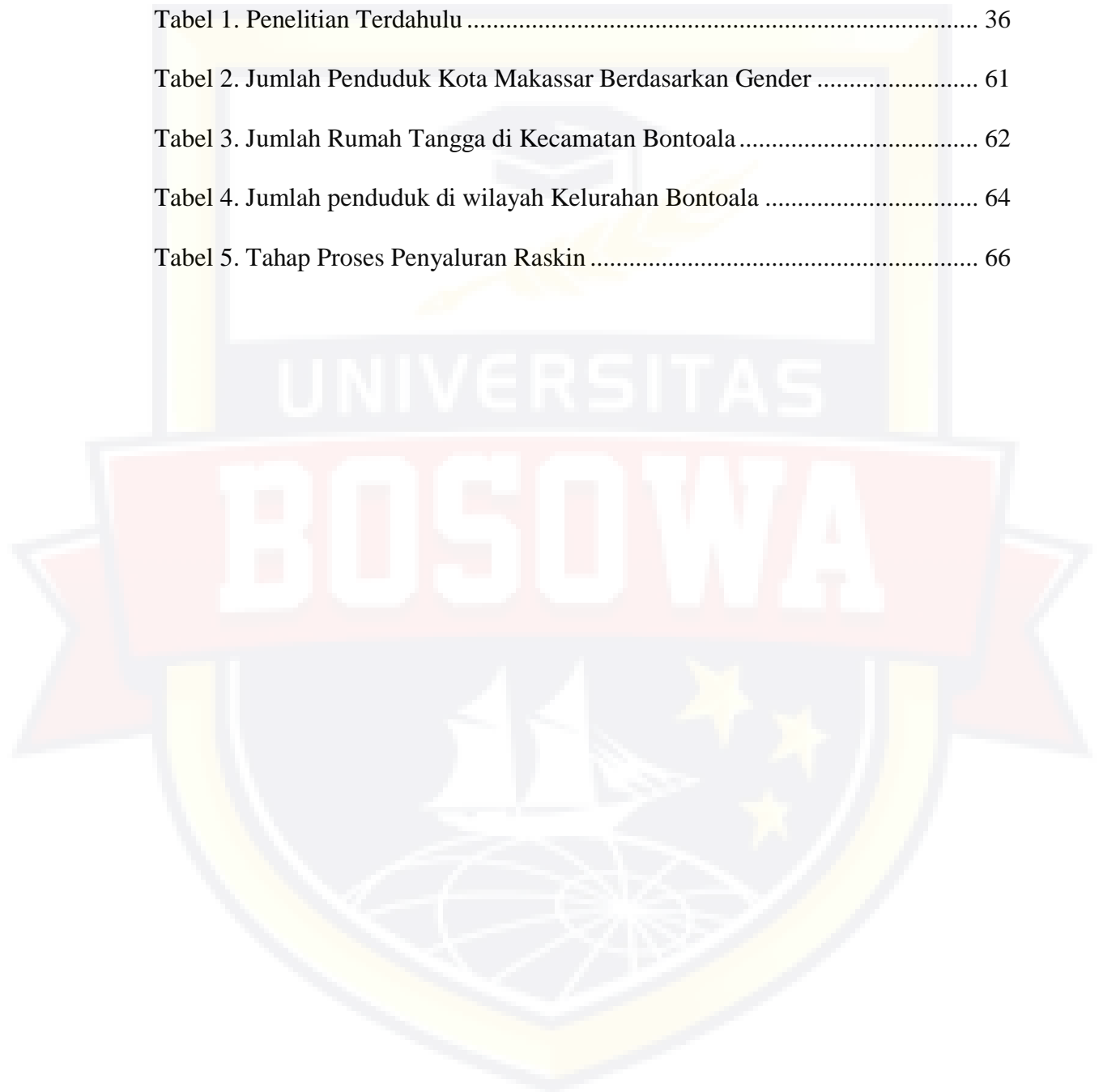
Gambar 1. Peta Alur Distribusi Raskin dari BULOG ke RTS.....	35
Gambar 2. Kerangka Konseptual	42
Gambar 3. Teknik Analisis Data Miles dan Huberman	55
Gambar 4. Peta Kecamatan Bontoala.....	60
Gambar 5. Lokasi Kelurahan Bontoala.....	63
Gambar 6. Ilustrasi penyaluran bantuan.....	69

UNIVERSITAS

BOSOWA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu	36
Tabel 2. Jumlah Penduduk Kota Makassar Berdasarkan Gender	61
Tabel 3. Jumlah Rumah Tangga di Kecamatan Bontoala	62
Tabel 4. Jumlah penduduk di wilayah Kelurahan Bontoala	64
Tabel 5. Tahap Proses Penyaluran Raskin	66



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Matriks pengembangan Instrumen Penelitian	104
Lampiran 2 Pedoman Wawancara	106
Lampiran 3 Panduan Observasi	108
Lampiran 4 Data Nama Informan	109
Lampiran 5 Hasil Penelitian.....	110
Lampiran 6 Surat Keterangan Penelitian Dari Kampus	116
Lampiran 7 Surat Keterangan Penelitian Dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	117
Lampiran 8 Surat Keterangan Penelitian Dari Badan Kesatuan Dan Politik.....	118
Lampiran 9 Surat Penelitian Dari Kecamatan Bontoala	119
Lampiran 10 Surat Keterangan Selesai Penelitian	120
Lampiran 11 Dokumentasi Peneliti.....	121

DAFTAR SINGKATAN

1. KPM : Keluarga Penerima Manfaat
2. DPM : Daftar Penerima Manfaat
3. BSP : Bantuan Sosial Pangan
4. NIK : Nomor Induk Penduduk
5. KK : Kartu Keluarga
6. PKH : Program Keluarga Harapan
7. KKS : Kartu Keluarga Sejahtera
8. BPNT : Bantuan Pangan Non Tunai
9. KTP : Kartu Tanda Penduduk
10. SIKS-NG : Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation

ABSTRAK

Sarmila 4517021018 bimbingan Dr. Uddin B. Sore, SH., S.IP., M.Si dan Drs. Natsir Tompo, M.Si melaksanakan penelitian dengan judul Implementasi Distribusi Bantuan Sosial (RASKIN) Bagi Masyarakat Miskin Di Kelurahan Bontoala Parang Kecamatan Bontoala Kota Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem distribusi bantuan raskin yang diselenggarakan oleh kelurahan bontoala parang.

Penelitian yang dilakukan di Kelurahan Bontoala Parang Kecamatan Bontoala Kota Makassar Sulawesi Selatan ini menggunakan jenis dan tipe penelitian kualitatif deskriptif dengan mengambil data dari Kantor Lurah melalui dengan dua metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu metode penelitian kepustakaan (penelitian normatif) yang diperoleh dari bahan pustaka atau data sekunder melalui analisa bahan-bahan berupa bahan-bahan yang mengikat seperti UU maupun bahan yang erat hubungannya dengan persoalan yang dibahas. Metode penelitian lapangan (penelitian empiris) yaitu dengan menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh informasi terkait data-data yang diperlukan. Maka untuk mengetahui sejauh mana peran implementasi distribusi bantuan sosial raskin terhadap masyarakat miskin dapat ditinjau melalui bentuk distribusi pemberian raskin dan bagaimana efektifitas pendistribusian raskin yang dilakukan kepada masyarakat miskin.

Proses analisis data menggunakan teknik analisis dan deskriptif dengan melalui tiga alur penerapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi data. Program Bantuan Sosial Raskin adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial di bidang pangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat berupa bantuan beras bersubsidi kepada rumah tangga berpendapatan rendah (rumah tangga miskin dan rentang). Pada umumnya bantuan sosial memiliki masalah terkadang tidak tepat sasaran. Maka sangat penting kemudian untuk mengetahui bagaimana kondisi implemtasi pendistribusian dalam menjalankan program raskin selama ini. Melalui hasil penelitian yang dilakukan, bahwa terdapat masalah dalam waktu pelaksana dan bagaimana efektifitas penyaluran program raskin. Waktu pelaksanaan yang tidak teratur yang menyebabkan keterlambatan penyaluran beras miskin, ketidakefektifan manfaat yang diharapkan dari keberadaan program raskin tidak tercapai. Tanggung jawab yang dilakukan oleh kelurahan mengakibatkan kurangnya transparansi harga dan target yang belum maksimal.

Kata Kunci: Implementasi, Distribusi, Program Raskin, Efektivitas

ABSTRACT

Sarmila 4517021018 under the guidance of Dr. Uddin B. Sore, SH., S.IP., M.Si and Drs. Natsir Tompo, M.Si conducted a research entitled Implementation of Social Assistance Distribution (RASKIN) for the Poor in Bontoala Parang Village, Bontoala District, Makassar City. This study aims to determine how the distribution system for Raskin assistance is organized by Bontoala Parang Village.

The research, which was conducted in Bontoala Parang Village, Bontoala Subdistrict, Makassar City, South Sulawesi, used the types and types of descriptive qualitative research by taking data from the Lurah Office through two methods used in data collection, namely the library research method (normative research) obtained from library materials or secondary data through analysis of materials in the form of binding materials such as laws and materials that are closely related to the issues discussed. The field research method (empirical research) is to use interview techniques to obtain information related to the required data. So to find out how far the role of the implementation of the distribution of Raskin social assistance for the poor can be reviewed through the form of distribution of Raskin and how effective the distribution of Raskin is to the poor.

The data analysis process uses analytical and descriptive techniques through three application paths, namely data reduction, data presentation and conclusion drawing/data verification. The Raskin Social Assistance Program is one of the poverty reduction and social protection programs in the food sector organized by the Central Government in the form of subsidized rice assistance to low-income households (poor and low-income households). In general, social assistance has the problem of sometimes not being well targeted. So it is very important then to know how the conditions of distribution implementation in carrying out the Raskin program so far are. Through the results of research conducted, that there are problems in the implementation time and how the effectiveness of the distribution of the Raskin program. Irregular implementation time which causes delays in distributing rice to the poor, the ineffectiveness of the expected benefits of the existence of the Raskin program is not achieved. The responsibility carried out by the kelurahan results in a lack of price transparency and targets that have not been maximized

Keywords: Implementation, Distribution, Raskin Program, Effectiveness

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesulitan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial di Indonesia menunjukkan bahwa kebutuhan dasar warga negara tertentu tidak terpenuhi karena tidak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Akibatnya, sebagian warga masih mengalami tantangan dalam menjalankan fungsi sosial, sehingga menghalangi mereka untuk menjalani kehidupan yang layak dan bermakna. Dalam beberapa tahun terakhir, tingkat kemiskinan Indonesia telah menurun. Namun, hal ini tidak meniadakan fakta bahwa Indonesia memiliki masalah kemiskinan. Masih banyak orang yang hidup di ambang kelaparan.

Menurut data BPS (Badan Pusat Statistik), jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 26,42 juta orang (9,78 persen) pada Maret 2020, naik 1,63 juta orang dari September 2019 yang sebesar 24,79 juta orang (9,22 persen). Hal ini menunjukkan bahwa angka kemiskinan Indonesia tidak akan berkurang, dan penduduk miskin negara itu akan bertambah tahun ini (Badan Pusat Statistika 2020).

Pangan merupakan hak asasi manusia sekaligus produk strategis yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pedoman Umum Raskin 2014). Pemerintah Indonesia menempatkan premi yang tinggi pada kebijakan ketahanan pangan negara. Indonesia juga telah menandatangani perjanjian internasional terkait pangan, Universal Declaration

of Human Right (1948), Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit 1996, Millennium Development Goals (MDGs).

Di Indonesia, beras merupakan makanan utama bagi 95% penduduk, dengan rata-rata konsumsi beras 113,7 kilogram per orang per tahun. Jumlah konsumsi ini secara signifikan lebih tinggi dari rata-rata global 60 kg/kapital/tahun. (Pedoman Umum Raskin 2014). Alhasil, Indonesia menjadi konsumen beras paling besar di dunia. Beras merupakan produk nasional yang sangat penting. Ketidakstabilan beras nasional dapat membawa malapetaka di sejumlah bidang masyarakat, termasuk sosial, politik, dan ekonomi.

Beras menyumbang sekitar 45 persen dari keseluruhan asupan makanan di Indonesia, atau sekitar 80 persen dari sumber karbohidrat utama dalam kebiasaan makan masyarakat Indonesia. Beras tetap menjadi bahan pangan yang paling esensial bagi penduduk secara gizi, ekonomi, sosial, dan budaya karena penyebarannya sangat merata di seluruh Indonesia.

Keadaan ini adalah hasil dari rekayasa budaya (*cultural*), yang memiliki dampak yang luas. Hal ini berdampak tidak langsung pada kebijakan pangan (*rice policy*) Indonesia yang harus memprioritaskan beras sebagai salah satu pondasi terpenting.

Program Beras Bersubsidi yang biasa juga disebut Beras Miskin (RASKIN) dan Beras Sejahtera (RASTRA), merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk meringankan beban keuangan rumah tangga miskin dengan mengupayakan perlindungan sosial berupa beras murah senilai hingga 15 kg per rumah tangga miskin per bulan dengan harga Rp 1600 per kg (netto) masing-

masing di titik distribusi (Ruru 2015). Perum Bulog bertugas mengantarkan beras dari gudang ke lokasi distribusi di kelurahan dengan skema ini, yang mencakup seluruh provinsi. Program Raskin ialah subsidi pangan yang dirancang oleh pemerintah untuk membangun ketahanan pangan dan memberi perlindungan kepada keluarga kurang mampu dengan membagikan beras kepada mereka.

Instrumen kebijakan program Raskin yakni Peraturan Pemerintah No. 68 (2002) tentang Ketahanan Pangan. Menurut PP tersebut, merencanakan program dan menganalisis serta mengevaluasi unsur-unsur yang mempengaruhi ketersediaan pangan sangat penting dalam kegiatan pencegahan dan penyelesaian masalah pangan.

Untuk mengatasi kerawanan pangan, sangat penting untuk mewaspadai kelebihan pangan, kekurangan pangan, dan ketidakmampuan rumah tangga untuk mencukupi kebutuhan pangan sejak dini. Akibatnya, untuk mengatasi masalah pangan penting melibatkan kegiatan seperti meningkatkan produksi dan pendapatan pangan jika terjadi surplus pangan, serta meningkatkan produksi dan pendapatan pangan jika terjadi kekurangan pangan.

Pembagian Raskin itu seharusnya dilakukan dengan prosedur yang baik. Prosedur didefinisikan dengan adanya program raskin yang dapat diwujudkan dengan mengkoordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi kementerian/lembaga terkait baik di Pusat maupun di Daerah.

Prosedur adalah serangkaian langkah (atau pelaksanaan pekerjaan) yang menggambarkan apa yang harus dilakukan, bagaimana harus dilaksanakan,

kapan harus dilaksanakan, di mana harus dilaksanakan, dan siapa yang harus melakukannya.

Raskin tidak tersedia untuk masyarakat Indonesia secara menyeluruh, tetapi hanya tersedia untuk individu yang sangat miskin dan rawan pangan di tempat-tempat tertentu. Data keluarga miskin dan rawan pangan diperoleh dari beberapa sumber seperti kelurahan dan sebagainya untuk memilih kelompok, terutama sesuai dengan kriteria yang diberikan. Koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi Kementerian/Lembaga terkait di tingkat Pusat dan Daerah diperlukan agar program Raskin dapat berjalan efektif. Dimulai dengan merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasi dilakukan dengan premis bahwa Raskin merupakan hak dari orang kurang mampu. Seluruh pihak yang bertanggung jawab dan berwenang dalam melaksanakan program Raskin berkewajiban untuk mendistribusikan Raskin kepada Rumah Tangga Penerima Manfaat (RTS-PM) yang ditetapkan oleh BPS, berdasarkan peran dan fungsi utama masing-masing. Pemerintah pusat memiliki andil dalam mengembangkan kebijakan program, sementara pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mewujudkannya. Oleh sebab itu, pemerintah daerah berperan dalam mendongkrak keberhasilan program Raskin sangat penting.

Salah satu kewajiban publik Perum Badan Usaha Logistik (BULOG) dalam hal ketahanan pangan yang telah disebutkan yakni menyediakan dan mendistribusikan beras bersubsidi kepada masyarakat berpenghasilan rendah melalui Program Beras Miskin (Raskin). Program yang sejalan dengan Intruksi

Presiden Nomor 3 (2012) tentang Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras Pemerintah ini bertujuan untuk menunjang salah satu pilar ketahanan pangan yaitu keterjangkauan (accessibility).

Program Raskin dimaksudkan untuk meringankan beban keuangan rumah tangga miskin dalam upaya membantu peningkatan ketahanan pangan dengan melindungi akses masyarakat terhadap beras murah. Program Raskin dimaksudkan untuk memberi peningkatan pada akses keluarga miskin terhadap pangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, sehingga memperkuat ketahanan pangan keluarga dan menahan pemerosotan konsumsi energi dan protein.

Para pelaksana program, maupun masyarakat miskin yang mendapatkan beras miskin seringkali menghadapi penyimpangan atau masalah. Salah satunya adalah banyak orang ekonomi tinggi yang masuk kategori mendapatkan beras miskin, sementara mereka yang benar-benar miskin tidak menerima program ini. Hal tersebut karena data yang diberikan oleh kelurahan atau desa dari kantor statistik sudah lama (tidak diperbarui), dan karenanya tidak akurat untuk situasi saat ini. Dimana ada orang sejahtera yang mendapatkan beras miskin karena data yang tersedia menunjukkan bahwa masyarakat tetap miskin. Selain itu, masih terdapat masyarakat yang menganggap bahwa program beras miskin merupakan program kelurahan daripada program pemerintah pusat, sehingga mereka mendatangi kantor kelurahan untuk meminta jatah bantuan pangan bagi masyarakat miskin. Hal ini membuktikan jika masih adanya masyarakat yang belum mengerti tentang beras miskin tersebut.

Permasalahan lain terkait pendistribusian beras miskin kepada masyarakat yang terkadang tidak sesuai dengan aturannya kadang jika ada sisa beras Raskin tersebut maka pihak kelurahan sendiri biasa menjual kembali beras Raskin tersebut ke pedagang-pedangan di sekitar kelurahan itu sendiri. (sumber : pedagang bakso yang bernama pak dul yang berdagang di sekitaran jalan satangnga)

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Implementasi Kebijakan Distribusi Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Miskin di Kelurahan Bontoala Parang Kecamatan Bontoala Kota Makassar.

1.2 Batasan dan Rumusan Masalah

1.2.1 Batasan Masalah

Banyak hal yang menyebabkan terjadinya pendistribusian RASKIN yang tidak merata. Oleh dikarenakan banyak data yang belum diperbarui oleh Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi permasalahan di atas, peneliti memberi batasan ruang lingkup penelitian yang berhubungan dengan Implementasi Pendistribusian Bantuan Sosial (RASKIN) Pada Masyarakat Miskin Kelurahan Bontoala Parang Kecamatan Bontoala Kota Makassar.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, sehingga rumusan masalah untuk penelitian antara lain:

1. Bagaimana Proses distribusi bantuan sosial (RASKIN) bagi masyarakat miskin di Kelurahan Bontoala Parang Kecamatan Bontoala Kota Makassar.
2. Bagaimana Efektivitas distribusi bantuan sosial (RASKIN) bagi masyarakat miskin di Kelurahan Bontoala Parang Kecamatan Bontoala Kota Makassar.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tentu saja, setiap penelitian studi memiliki tujuan dalam yang hendak dicapai. Karena tujuan menjadi standar dan fokus upaya penelitian. Penulis membuat tujuan penelitian berikut didasarkan pada rumusan masalah yang ada, yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana proses distribusi bantuan sosial bagi masyarakat miskin di Kelurahan Bontoala Parang Kecamatan Bontoala Kota Makassar.
- b. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas distribusi bantuan sosial bagi masyarakat miskin di Kelurahan Bontoala Parang Kecamatan Bontoala Kota Makassar.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini terdiri dari:

- a. Penelitian ini dapat memberikan sumbangsi bagi pembelajaran dan pengembangan Ilmu Administrasi Negara mengenai bagaimana pemerintah menghadapi sebuah program beras miskin (RASKIN) yang ada di Makassar.
- b. Menambah informasi tentang sejauh mana penerpan program beras miskin (RASKIN) di Makassar sehingga bisa memberikan informasi dan masukan kepada pemerintah terkait.
- c. Memberikan tambahan informasi kepada pembaca untuk mengetahui mengenai program beras miskin (RASKIN) supaya untuk meningkatkan salah satu upaya program pemerintah kota.
- d. Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai referensi bagi para peneliti lain yang ingin melaksanakan penelitian lebih lanjut terkait topik yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Implementasi Kebijakan

2.1.1 Pengertian implementasi

Secara sederhana Implementasi ialah penerapatan atau pelaksanaan. Istilah implementasi juga dapat merujuk pada tindakan melaksanakan rencana yang telah dibuat. Brown dan Wildavsky (Usman, 2004:7) berpendapat: “Implementasi artinya perpanjangan dari kegiatan dalam penyesuaian satu sama lain”.

Menurut syaukani dkk (2004 : 295) sebagai berikut:

“Implementasi ialah seperangkat kebijakan yang dapat menghasilkan hasil yang diinginkan. Rangkaian kegiatan diawali dengan pembuatan seperangkat peraturan tambahan yang berfungsi sebagai interpretasi kebijakan. Kedua, sumber daya untuk mendukung kegiatan implementasi kebijakan, seperti gedung dan infrastruktur, sumber daya keuangan, dan tentunya mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan. Ketiga, bagaimana kebijaksanaan dapat disampaikan kepada masyarakat secara praktis dan kongkrit”.

Menurut pandangan ini, proses implementasi kebijakan yang sebenarnya melibatkan tidak hanya tindakan badan administratif yang

bertugas mengerjakan program dan menanamkan kepatuhan pada kelompok sasaran, melainkan pula jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang terlibat dalam menentukan arah dalam dimana tujuan dari kebijakan publik dapat diwujudkan sebagai hasil kegiatan pemerintah.

Syukur dalam **Surmayadi (2005 : 79)** memaparkan tiga aspek penting dalam proses implementasi antara lain: (1) terdapat program atau kebijakan yang berlaku (2) kelompok sasaran, yakni kelompok masyarakat yang program, modifikasi, atau peningkatannya ditujukan dan ditemukan manfaatnya. (3) Unsur pelaksana (implementors), baik organisasi maupun individu, yang bertugas melaksanakan dan mengawasi proses.

Penyusun kebijakan berusaha memberi pengaruh terkait apa yang Lipsky sebut sebagai "*street level bureaucrats*" untuk memberi pelayanan atau pengelolaan tindakan kelompok sasaran selama implementasi. Kebijakan sederhana, seperti kebijakan pembangunan infrastruktur publik untuk mengatur kehidupan masyarakat yang lebih baik, dilaksanakan oleh satu instansi; Di sisi lain, kebijakan makro, seperti kebijakan penanggulangan kemiskinan di pedesaan dan perkotaan, dilaksanakan oleh berbagai institusi, antara lain kabupaten, kecamatan, desa, dan perkotaan.

Tujuan implementasi kebijakan yaitu untuk menciptakan arah tindakan pemerintah yang harus diikuti untuk mencapai tujuan kebijakan publik. Perilaku para pemangku kepentingan kebijakan (*policy stakeholder*) dan lingkungan (*environment*), yang merupakan konteks khusus di mana

peristiwa-peristiwa seputar isu kebijakan terjadi, memiliki dampak yang kuat terhadap efektivitas implementasi kebijakan ini, sehingga menjadikan proses kebijakan sebagai proses dialektis di mana dimensi objektif dan subjektif dari pembuatan kebijakan tidak bisa dicapai dan pembuatan kebijakan tidak terpisah dari praktik yang sebenarnya.

Keberhasilan implementasi kebijakan dapat diukur dari sejauh mana implementasi/implementasi kebijakan sejalan dengan desain, maksud, dan tujuan kebijakan, serta berdampak/hasil positif dalam menyelesaikan permasalahan.

Semakin tinggi tingkat kesesuaian, semakin besar kemungkinan kebijakan akan berhasil diterapkan dan menghasilkan efek yang diinginkan, adalah salah satu asumsi yang mungkin dibuat tentang konsep implementasi kebijakan yang sukses.

Seorang ahli Jan Merse dalam (Sunggono, 1994) menyoroti variabel-variabel yang mampu menyebabkan kegagalan dalam implementasi suatu kebijakan untuk memastikan kesesuaian antara tujuan dan sasaran kebijakan dengan fakta di lapangan, antara lain:

a. Informasi

Informasi sangat penting untuk menyatukan pemahaman, visi, dan misi kebijakan yang ditetapkan. Apabila sekelompok orang yang bekerjasama saling berbelas kasih dan transparan satu sama lain, informasi akan mengalir secara efektif. Minimnya informan akan mengakibatkan gambaran yang

keliru tentang isi kebijakan yang akan dilaksanakan, baik bagi tujuan kebijakan maupun bagi pelaksana kebijakan.

b. Isi kebijakan

Mengingat bahwa kebijakan publik ditujukan untuk menangani isu-isu publik, maka isi kebijakan akan berdampak pada seberapa baik implementasinya. Isi kebijakan seharusnya jelas dan tegas, dengan muatan politik yang memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan. Implementasi kebijakan dapat mengalami kegagalan karena berbagai alasan, termasuk isi atau tujuan kebijakan yang tidak berubah, ketidakpastian atau keragu-raguan internal atau eksternal dari kebijakan itu sendiri yang memperlihatkan kekurangan parah atau kurangnya sumber daya pendukung.

c. Dukungan

Faktor ini dapat berupa bantuan fisik atau non-fisik. Jika tidak ada dukungan yang cukup untuk implementasi kebijakan, implementasi kebijakan akan menjadi tantangan. Dukungan menurut Jan Marse tak lepas dari partisipasi masyarakat sebagai pemangku kepentingan dalam proses pelaksanaan program. Jadi, jika program ini didorong oleh peningkatan partisipasi masyarakat pada sejumlah tahapan, termasuk tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan, dan evaluasi dari setiap program yang dilakukan, maka akan berkelanjutan.

d. Pembagian potensi

Kinerja intensif dalam mengkoordinasi antara pemain yang ada, termasuk pemerintah, sektor komersial, dan masyarakat luas, sangat penting untuk aspek potensi berbagi. Karena setiap aktor memiliki minat dan keinginan yang unik, koordinasi menjadi titik fokus dan titik temu untuk keberhasilan implementasi inisiatif pembangunan.

Banyak aspek atau faktor yang akan memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, dan setiap aspek tersebut saling berkaitan. Ada berbagai teori implementasi yang dapat membantu kita lebih memahami berbagai faktor yang terlibat dalam implementasi.

2.1.2 Teori Implementasi Kebijakan

Dalam pandangan George C. Edwards III (dalam buku dasar-dasar kebijakan publik), variabel yang memengaruhi implementasi kebijakan, antara lain:

“(1) komunikasi (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berkaitan satu sama lain”.

1) Komunikasi

Pelaksana harus tahu apa yang harus dilakukan agar kebijakan berhasil. Pelaksana perlu mengkomunikasikan maksud dan tujuan kebijakan kepada khalayak sasaran agar tidak terjadi distorsi implementasi. Resistensi kemungkinan akan berkembang apabila

tujuan dan target dari kebijakan tidak jelas atau mungkin tidak dipahami oleh kelompok sasaran.

2) Sumber Daya

Sekalipun isi kebijakan telah dinyatakan dengan jelas dan konsisten, implementasi tidak akan efektif apabila implementor tidak mempunyai sumber daya untuk melakukannya. Sumber daya manusia, khususnya kompetensi pelaksana, dan sumber daya keuangan adalah contoh dari sumber daya tersebut. Implementasi kebijakan yang efektif membutuhkan sumber daya yang cukup. Kebijakan tetap di atas kertas sebagai dokumen karena kurangnya sumber daya.

3) Disposisi

Disposisi pelaksana ditentukan oleh ciri-ciri kepribadiannya. Apabila pelaksana mempunyai kepribadian menyenangkan, pelaksana akan melaksanakan kebijakan sebagaimana yang dimaksudkan oleh perumus kebijakan. Jika pelaksana mempunyai sikap atau cara pandang yang berbeda dengan perumus kebijakan, maka mekanisme implementasi kebijakan tidak akan efektif. Sejumlah pengalaman pembangunan di negara-negara dunia ketiga membuktikan bahwa tingkat komitmen dan kejujuran aparat masih rendah. Beragam persoalan korupsi telah dilaporkan di negara-negara dunia ketiga seperti Indonesia merupakan indikator nyata dari kurangnya pengabdian dan kejujuran aparat dalam melaksanakan proyek-proyek pembangunan.

4) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang membidangi implementasi kebijakan mempunyai dampak yang cukup besar terhadap implementasi kebijakan. Ketersediaan prosedur operasi standar adalah salah satu fitur struktural paling signifikan dari setiap bisnis (SOP). *Standar operational prosedur* (SOP) adalah seperangkat aturan yang harus diikuti oleh setiap aktor. Struktur organisasi yang lebih panjang mengganggu pemantauan dan berkontribusi pada birokrasi, yaitu mekanisme birokrasi yang sulit dan rumit yang mengakibatkan tidak fleksibelnya kegiatan organisasi. Teori Meter dan Horn juga mendukung pandangan ini.

Terdapat enam elemen yang memengaruhi kinerja implementasi oleh Van Meter dan Van Horn (dalam bukunya tentang dasar-dasar kebijakan publik):

- 1) Standar dan sasaran kebijakan. Agar dapat diwujudkan, standar dan tujuan kebijakan harus jelas dan terukur.
- 2) Sumber daya, pelaksanaan kebijakan memerlukan partisipasi baik sumber daya manusia maupun non-manusia.
- 3) Hubungan antar organisasi. Di banyak kasus, pelaksanaan program memerlukan kerjasama dan kerjasama dengan instansi lain.
- 4) Karakteristik agen implementasi. Ciri-ciri agen pelaksana mengacu pada struktur birokrasi, konvensi, dan pola interaksi

yang ada di dalam birokrasi, yang keseluruhan berdampak pada implementasi program.

- 5) Situasi di bidang sosial, politik, dan ekonomi. Variabel ini mengacu pada sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat membantu keberhasilan implementasi kebijakan.
- 6) Disposisi implementor terdiri dari tiga unsur: reaksi pelaksana terhadap kebijakan yang akan memengaruhi kesediaannya untuk mengimplementasikan kebijakan; respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kesediaannya untuk mengimplementasikan kebijakan; dan kesediaan implementor untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Dan kekuatan disposisi implementor, yaitu preferensi nilai implementor.

2.1.3 Tahapan Implementasi Kebijakan

Tahap implementasi kebijakan dimana kebijakan tersebut dipengaruhi oleh beragam keadaan ketika sedang diimplementasikan. Dengan demikian akan mudah memahami bagaimana kinerja suatu kebijakan, bagaimana interaksi dengan kelompok target, dan bagaimana berbagai elemen lingkungan (politik, sosial, dll) mempengaruhi implementasi kebijakan.

Van Meter dan Van Horn dalam Sujianto (2008:35) mengungkapkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh:

a. Standar dan Tujuan Kebijakan (*policy standards objecties*)

Faktor-faktor yang memengaruhi hasil kerja, yang penting dalam analisis, diprioritaskan dalam standar dan tujuan kebijakan. Indikator ini jelas sebab mengukur sejauh mana standar dan tujuan memberi penjelasan terkait kebijakan secara keseluruhan dan mudah diukur dalam banyak keadaan.

b. Sumber daya kebijakan (*Policy Resources*)

Fokus implementasi kebijakan tidak hanya pada norma dan tujuan, melainkan pula pada sumber daya yang tersedia untuk mempermudah administratif. Dana dan insentif adalah salah satu sumber daya yang diantisipasi yang diharapkan mampu membantu pelaksanaan yang efektif.

c. Aktifitas pengamatan dan komunikasi interorganisasional (*Interorganizational Communication and Enforcement Activities*)

Untuk memastikan efektifitas implementasi, karyawan yang bertanggung jawab harus memahami kriteria dan tujuan program. Lalu ada kebutuhan dalam konsistensi komunikasi dengan tujuan memperoleh data.

2.1.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembuatan Kebijakan

Proses pembuatan kebijakan adalah tugas yang sulit dan kompleks yang tidak sesederhana dari kelihatannya. Administrator organisasi atau institusi institusional, di sisi lain, harus memiliki kewajiban dan kapasitas, serta kompetensi atau keterampilan, untuk menetapkan

kebijakan yang menangani resiko yang diharapkan (*intended risks*) dan yang tidak diharapkan (*unintended risks*), Suharno (2010:52).

Beberapa elemen memiliki dampak pada pembuatan kebijakan. Hal penting yang harus diperhatikan dan yang kemudian dapat diprediksi ialah pembuat kebijakan sering melakukan kesalahan yang sama. Faktor-faktor berikut berdampak pada perumusan kebijakan:

a) Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar

Seringkali, pembuat kebijakan harus menanggapi desakan eksternal atau menetapkan keputusan sebagai tanggapan terhadap kekuatan eksternal.

b) Adanya pengaruh kebiasaan lama

Sunk cost ialah kebiasaan lama organisasi yang dikutip oleh Nigro, seperti kebiasaan penanaman modal yang tidak profesional dan terkadang sangat birokratis hingga saat ini. Administrator cenderung mengikuti kebiasaan ini, meskipun keputusan/kebijakan terkait hak tersebut dikritik sebab salah dan perlu ada perubahan. Perilaku lama ini sering dibenarkan, terutama ketika kebijakan yang ditetapkan dianggap memadai.

c) Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi

Kualitas pribadi memiliki dampak yang signifikan pada berbagai tindakan dan kebijakan. Sifat pribadi adalah komponen penting dalam memutuskan penilaian dan kebijakan.

d) Adanya pengaruh dari kelompok luar

Lingkungan sosial dari para pembuat keputusan/kebijakan juga memiliki peranan yang besar.

e) Adanya pengaruh keadaan masa lalu

Aspek ini menyiratkan bahwa pengalaman kerja dan pelatihan sebelumnya berdampak pada kebijakan dan pengambilan keputusan. Misalnya, seseorang ragu untuk mendelegasikan wewenangnya kepada orang lain karena takut disalahgunakan (Suharno: 2010 52-53).

2.2 Konsep Distribusi

2.2.1 Pengertian Distribusi

Penentuan saluran distribusi yang tepat merupakan isu penting yang harus diperhatikan ketika berusaha memfasilitasi pergerakan barang atau jasa dari produsen ke konsumen (saluran distribusi).

Keputusan distribusi perusahaan berdampak pada bagaimana konsumen bisa mendapatkan barang yang dihasilkannya. Perusahaan merancang cara untuk membuktikan bahwa barang yang dikirim ke pelanggan ditempatkan di lokasi yang sesuai.

Oleh karenanya, sangat penting untuk mengetahui bagaimana memilih saluran distribusi terbaik untuk sebuah perusahaan. Produsen menggunakan saluran distribusi untuk mendapatkan barang ke tangan konsumen, atau berbagai tindakan tegas yang berusaha untuk mendapatkan barang ke tangan konsumen.

Dalam KBBI arti distribusi ialah penyaluran (pembagian, pengiriman) barang-barang kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat.

Sedangkan distribusi ialah sekelompok entitas yang melakukan proses pendistribusian komoditas atau jasa untuk digunakan atau digunakan oleh konsumen (pembeli), menurut Philip Kotler (1997).

Akibatnya, kegiatan distribusi sangat penting untuk mendapatkan barang dari produsen ke konsumen agar barang-barang yang dibuat akan menjangkau ke konsumen sampai didistribusikan. Jadi, fungsi distribusi antara lain:

- 1) Menyalurkan produk dari produsen ke pelanggan.
- 2) Membantu kelancaran pemasaran sehingga komoditi hasil produksi produsen dapat langsung dijual ke konsumen.

Pentingnya masalah waktu tidak dapat dilebih-lebihkan. Jika komoditi yang dibutuhkan dapat diperoleh pada saat dibutuhkan, maka kegunaan barang tersebut akan maksimal. Sebaliknya, pedistribusian yang tidak tepat waktu akan mengakibatkan kerugian baik bagi produsen maupun konsumen. Menurut Verno dan Jackson (1994), saluran distribusi diklasifikasikan menjadi tiga bentuk berdasarkan intensitasnya:

- i. Bentuk intensif, yang menggunakan sejumlah besar perdagangan besar dan kecil.

- ii. Distribusi selektif, yang melibatkan penggunaan hanya beberapa grosir dan sejumlah kecil pengecer.
- iii. Bentuk eksklusif, saluran distribusi yang produknya hanya ditangani oleh satu perantara dalam suatu komunitas tertentu. Saluran langsung dan saluran tidak langsung adalah dua jenis saluran yang saat ini kita temui. Dari produsen ke pelanggan, ada jalur langsung. Hanya beberapa produk yang biasanya dijual langsung. Ada dua jenis saluran tidak langsung: produsen ke pengecer ke konsumen dan produsen ke pedagang grosir ke pengecer ke konsumen.

Kolter (2001) mendefinisikan bahwa:

“Saluran distribusi ialah sekelompok perusahaan yang saling berhubungan yang bekerja sama untuk mendapatkan produk atau layanan yang siap dimanfaatkan atau dikonsumsi. Saluran distribusi pada umumnya adalah perantara yang menghubungkan produsen dan konsumen”.

Perantara yang dimaksud diklasifikasikan menjadi: pedagang perantara dan agen perantara. Perbedaannya terdapat pada komponen kepemilikan serta prosedur negosiasi yang terlibat dalam menyalurkan produk yang tersebar. Berikut ini adalah pengertian perdagangan perantara dan agen perantara:

1. Pedagang perantara

Pada dasarnya pedagang perantara memiliki tanggung jawab atas semua produk yang dijualnya, atau dalam arti lain pedagang berhak memiliki barang tersebut. Pedagang grosir dan pengecer adalah dua organisasi yang membentuk perdagangan perantara. Namun, tidak mengesampingkan gagasan bahwa, selain memproduksi komoditas, mereka juga memperdagangkannya.

2. Agen perantara

Semua produk yang ditangani oleh agen perantara adalah milik mereka. Mereka dibagi menjadi dua kategori: 1) agen pendukung, yang meliputi agen jual beli, agen transportasi, dan agen penyimpanan, dan 2) agen pelengkap, yang meliputi agen yang menunjang di bidang keuangan, agen yang mendukung di bidang keputusan, agen yang dapat memberi informasi, dan agen khusus.

Ada berbagai saluran alternatif atau jenis saluran yang dapat digunakan. Seringkali, alternatif saluran diorganisasikan ke dalam kelompok, seperti:

- 1) Barang konsumsi ialah barang yang diperuntukkan guna keperluan pribadi. Pembelian merujuk pada kebiasaan pembelian konsumen. Menurut Basu private, pelanggan ialah pembeli/konsumen akhir, bukan pengguna industri, karena

produk-produk tersebut tidak lagi diolah dan digunakan sendiri (1998),

- 2) Barang industri yaitu barang yang dibeli untuk diolah kembali atau digunakan untuk industri. Perusahaan, institusi, atau organisasi, termasuk nirlaba, adalah pelanggan barang-barang industri ini. Berdasarkan hal di atas, pupuk, seperti komoditas industri lainnya, digolongkan demikian karena petani membeli pupuk untuk digunakan dalam produksi pertanian daripada untuk penggunaan pribadi.

Distribusi fisik, seperti yang didefinisikan oleh Dewan Distribusi Fisik Nasional Amerika Serikat, yakni rangkaian operasi komprehensif yang berkaitan dengan pergerakan efektif komoditas jadi dari akhir jalur produksi ke konsumen. Pergerakan bahan baku dari sumber ke awal jalur produksi disertakan. Manajemen distribusi fisik hanyalah salah satu dari kata-kata yang digunakan untuk mengungkapkan kontrol yang disebutkan di atas atas transportasi komoditas. Manajemen logistik pemasaran adalah judul lain untuk ini. Akibatnya, terminologi untuk gagasan mendasar adalah sama.

2.2.2 Tujuan dan Fungsi Pokok Distribusi

Berikut merupakan tujuan distribusi, diantaranya:

1. Menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen.
2. Meningkatkan percepatan sampainya hasil produksi ketangan konsumen.
3. Terwujudnya pemerataan produksi
4. Membangun kualitas dan kuantitas produksi.
5. Menjaga kontinuitas produksi.
6. Mengembangkan nilai guna barang dan jasa.

Fungsi distribusi dapat dibedakan menjadi dua, antara lain fungsi pokok dan fungsi tambahan.

1) Fungsi Pokok Distribusi

Berikut ini adalah fungsi pokok distribusi:

a. Pengangkutan (*Transportasi*)

Secara umum, lokasi produksi dibedakan dengan lokasi konsumsi, dan disparitas ini harus dijembatani oleh kegiatan transportasi. Kebutuhan manusia tumbuh seiring dengan pertumbuhan penduduk dan peningkatan teknologi. Akibatnya, jumlah barang yang akan didistribusikan meningkat, sehingga memerlukan penggunaan alat transportasi (pengangkutan).

b. Penjualan (*selling*)

Produsen selalu terlibat dalam operasi penjualan dalam hal pemasaran komoditas. Penjualan dapat digunakan untuk

mengalihkan hak dari produsen kepada konsumen. Konsumen dapat menggunakan komoditas tersebut sebagai hasil dari upaya penjualan.

c. Pembelian (*buying*)

Ada aktivitas membeli setiap kali ada penjualan. Orang yang membutuhkan barang melakukan pembelian jika barang tersebut dijual oleh produsen.

d. Penyimpanan (*storing*)

Barang sering disimpan sebelum dipasok ke pelanggan. Penyimpanan penting untuk menjamin kelangsungan, keamanan, dan keutuhan barang (pergudangan).

e. Pembakuan Standar kualitas Barang

Banyak penjual dan pembeli yang membutuhkan ketentuan kualitas, jenis, dan ukuran barang yang akan diperdagangkan dalam setiap transaksi jual beli. Oleh sebab itu, diperlukan standarisasi jenis, ukuran, dan kualitas produk yang akan diperdagangkan agar barang dapat tersebar sesuai rencana.

f. Penanggung Resiko

Kerusakan dan penyusutan barang merupakan risiko yang harus ditanggung oleh sebuah distribusi.

2) Fungsi Tambahan Distribusi

Fungsi tambahan distribusi dalam hal ini yakni:

a. Seleksi

Aktivitas ini sering dilakukan untuk distribusi produk pertanian dan hasil yang diperoleh dari sejumlah bisnis yang berbeda.

b. Pengemasan

Barang harus dibungkus dengan benar untuk menghindari kerusakan atau kehilangan selama distribusi.

c. Pemberian Informasi

Produsen harus memberikan informasi yang cukup kepada perwakilan daerah atau konsumen yang dipandang akan membutuhkan informasi untuk memberikan kesenangan secara maksimal kepada pelanggan; informasi yang paling relevan dapat diberikan melalui iklan.

2.2.3 Indikator Distribusi

Menurut Kotler and Keller (2007, 122) ada beberapa indikator yang dapat digunakan dalam pengukuran distribusi, yakni:

1. Sistem Transportasi: Ini mengacu pada bagaimana barang dikirim atau didistribusikan.
2. Ketersediaan produk: jumlah produk yang disediakan untuk konsumen oleh perusahaan.
3. Waktu tunggu: jumlah waktu yang harus dimiliki pelanggan untuk menunggu produk yang diinginkan.

2.2.4 Sistem Distribusi

Mekanisme yang digunakan dalam proses penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen disebut sebagai sistem saluran distribusi. Sistem saluran distribusi berupaya agar hasil produksi sampai ke tangan konsumen secara tepat waktu, namun juga harus mempertimbangkan keadaan produsen dan infrastruktur masyarakat, karena sistem saluran distribusi yang baik akan sangat bermanfaat bagi kegiatan produksi dan konsumsi. Produksi didistribusikan dari produsen ke konsumen.

2.3 Konsep Efektivitas

2.3.1 Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari bahasa Inggris *effective*: keberhasilan atau sesuatu yang dilaksanakan tercapai dengan baik. Kamus ilmiah populer mengartikan efektivitas sebagai ketepatan kegunaan, hasil guna atau penunjang tujuan.

Steers memaparkan bahwa “Efektivitas mengacu pada kemampuan program untuk mencapai tujuannya sebagai sistem dengan sumber daya dan cara yang terbatas, tanpa membahayakan teknik dan sumber daya tersebut atau memberikan tekanan yang berlebihan pada penerapannya.”

Menurut Gibson, Efektivitas didefinisikan sebagai pencapaian tujuan dan metode yang disepakati untuk mewujudkan tujuan umum perusahaan. Tingkat tujuan dan sasaran mencerminkan efektivitas

organisasi. Tingkat pengorbanan yang dilakukan akan menentukan tercapai atau tidaknya tujuan dan sarana.

2.3.2 Indikator Efektivitas

Berikut kriteria atau indikator efektivitas menurut Tangkilisan, 2005:141, antara lain:

- a. Kemampuan adaptasi: keberhasilan suatu organisasi ditentukan oleh kemampuannya untuk menyesuaikan terhadap peristiwa/hal yang berubah baik di lingkup internal atauun eksternal organisasi.
- b. Kepuasan kerja: keadaan pikiran yang dialami oleh seluruh anggota organisasi yang dapat memberikan kenyamanan dan dorongan untuk meningkatkan kinerja organisasi.
- c. Tanggung jawab: organisasi mampu mengerjakan tanggung jawab yang ditetapkan sebelumnya dan menghadapi dan menyelesaikan kesulitan yang muncul dalam operasinya.
- d. Pencapaian Target: Dalam hal ini, pencapaian target didefinisikan sebagai sejauh mana tujuan organisasi dapat dicapai dengan baik. Kondisi tersebut bisa ditunjukkan dengan seberapa jauh tujuan organisasi diimplementasikan dalam mewujudkan sasaran berdasarkan tujuan yang sudah ditentukan.

2.4 Konsep Bantuan Sosial

Bansos (Bantuan Sosial) merupakan penyaluran uang/barang oleh pemerintah daerah kepada perorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang bersifat tidak berkesinambungan dan selektif serta berusaha memberi perlindungan dari kemungkinan adanya kesenjangan sosial. Anggota/kelompok masyarakat dapat memperoleh dukungan sosial berupa uang atau barang.

Penyesuaian bantuan sosial yang diberikan dilihat dari kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan secara selektif, setelah mengutamakan terpenuhinya belanja wajib yang diamanatkan undang-undang. Pemberian bantuan sosial ditujukan untuk membantu pemerintah daerah dalam mencapai sasaran kegiatan dan program dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan, ketaatan, dan persamaan ras.

- a. Individu, keluarga, atau masyarakat yang menghadapi kondisi tidak aman sebagai dampak dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar hidup, dan
- b. lembaga swadaya masyarakat (non-pemerintahan) di bidang pendidikan, agama, dan binaan yang berfungsi dalam aspek perlindungan individu, kelompok, atau masyarakat dari hal yang memungkinkan adanya resiko sosial.

Menurut Kementrian Sosial (2011:15) sebagai berikut:

“Bantuan sosial ialah jenis bantuan sementara yang diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu dalam rangka membantu kehidupan yang lebih baik secara layak. Program bansos sebagai

salah satu komponen program jaminan sosial yang merupakan salah satu bentuk perwujudan tanggung jawab pemerintah atau pemerintah daerah untuk memerhatikan masyarakat miskin dan terlantar di lapisan bawah”.

Implementasi program ini menurut Pasal 24 ayat 1 UUD 1945 (2010: 79) ialah:

“fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.

Sementara itu, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 2 juga menyatakan:

“negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.

2.5 Konsep Kemiskinan

2.5.1 Pengetian Kemiskinan

Kemiskinan didefinisikan sebagai kegagalan orang berpenghasilan rendah untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari dibandingkan dengan kualitas hidup rata-rata masyarakat di lokasi atau kategori kehidupan yang layak. Pendapatan rendah atau kekurangan penuh kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan perumahan mencirikan keadaan ketidakmampuan ini. Ketidakmampuan untuk mencapai standar hidup normal, seperti standar pendidikan dan kesehatan juga akan mengakibatkan penurunan dalam memenuhi standar hidup rata-rata.

Kemiskinan di Indonesia secara umum didefinisikan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya. Karena kebutuhan dasar harus dipenuhi agar seseorang dapat bertahan hidup.

2.5.2 Faktor Penyebab Kemiskinan

Terdapat dua kategori faktor-faktor penyebab kemiskinan, diantaranya:

1. Faktor Internal

Aspek ini timbul dari diri sendiri yang mengalami kemiskinan berupa kekurangmampuan:

- a) Dalam segi fisik; cacat, kurang gizi, sakit-sakitan.
- b) Dalam segi intelektual: minim pengetahuan, bodoh, miskin informasi.
- c) Dalam segi mental emosional; malas, bebal, putus asa.
- d) Dalam segi sosial psikologis: kurang motivasi, kurang percaya diri, stress.
- e) Dalam segi keterampilan: tidak memiliki bakat dalam lapangan pekerjaan.
- f) Dalam segi aset: tanah, rumah, kendaraan.

2. Faktor Eksternal

Faktor kedua bersumber dari eksternal diri sendiri atau keluarga yang merasakan juga mengalami kemiskinan itu, yang pada akhirnya membuatnya menjadi miskin:

- a) Kebijakan perbankan pada layanan kredit mikro dan tingkat bunga yang tidak menunjang sektor usaha mikro.
- b) Budaya yang kurang mendorong kemajuan dan kesejahteraan.
- c) Kondisi geografis yang sulit, tandus, terpencil, atau wilayah bencana.
- d) Pembangunan ekonomi antar daerah yang belum merata.
- e) Keterbatasan lapangan pekerjaan formal dan kurang terlindungnya usaha-usaha sektor informal.
- f) Dampak sosial negatif dari program penyesuaian struktural.

2.6 Konsep Beras Miskin (RASKIN)

Sejak tahun 1998, penyaluran RASKIN (Beras untuk Rumah Tangga Miskin) telah berlangsung. Krisis moneter tahun 1998 menandai dimulainya program RASKIN yang dimaksudkan untuk meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga, khususnya di kalangan masyarakat miskin. RASKIN diperluas tidak hanya sebagai program darurat (jaring pengaman sosial) tetapi sebagai bagian dari program perlindungan sosial masyarakat. Pertama kali dikenal dengan program Operasi Pasar Khusus (OPK), lalu terjadi perubahan menjadi RASKIN pada tahun 2002. Penyebutan RASKIN sebagai nama program diharapkan lebih tepat sasaran dan memenuhi tujuan RASKIN, menurut sebuah studi ilmiah.

Program Raskin merupakan tindak lanjut dari arahan kebijakan pemekaran nasional Presiden. Presiden mengarahkan seluruh Menteri

dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, serta Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia, untuk bekerja meningkatkan pendapatan petani, ketahanan pangan, pembangunan ekonomi pedesaan, dan stabilitas ekonomi nasional.

BULOG secara khusus ditugaskan untuk menyediakan dan mendistribusikan beras bersubsidi kepada organisasi masyarakat berpenghasilan rendah dan rawan pangan yang penyediannya memprioritaskan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri. Pendistribusian beras bersubsidi kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dimaksudkan untuk meminimalkan pengeluaran pangan RTS-PM. Selain itu, bertujuan untuk membangun akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap kebutuhan pangan pokok, yang merupakan salah satu hak dasar mereka.

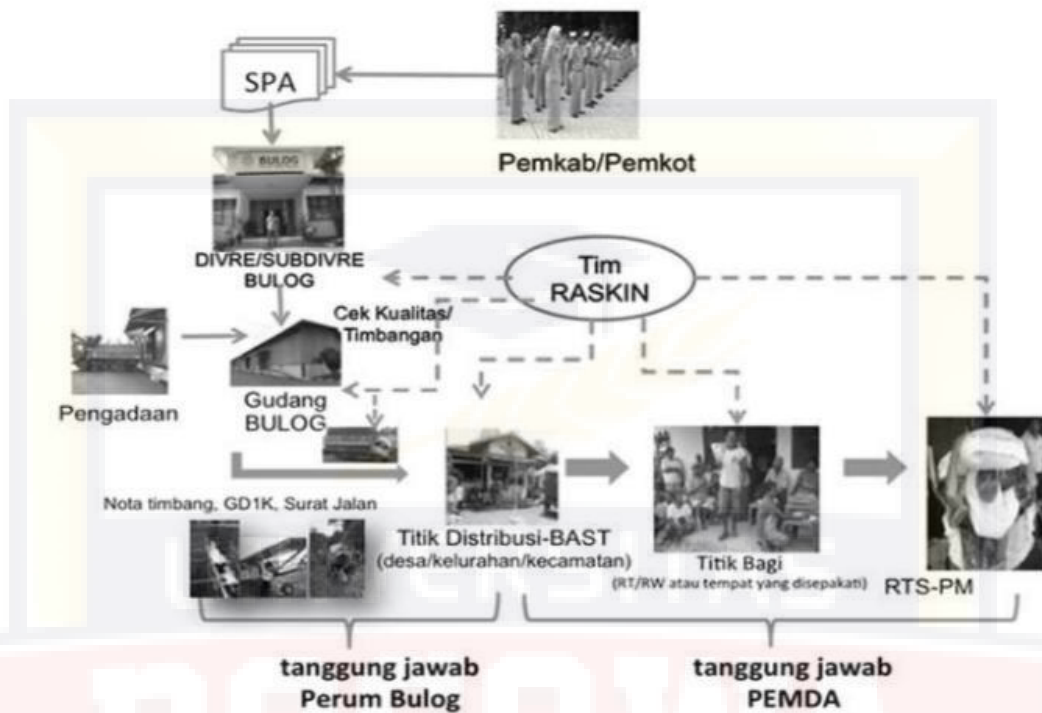
Berdasarkan pedum Raskin peraturan Perundang-Undangan yang menjadi landasan penerapan program RASKIN antara lain:

1. Undang-Undang RI No. 18 (2012), tentang pangan.
2. Peraturan Pemerintah No. 68 (2002), tentang Ketahanan Pangan.
3. Peraturan Pemerintah No. 7 (2003), tentang Pendirian Perusahaan BULOG.
4. Intruksi Presiden (2012), tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.
5. Permenkeu tentang Penunjukan Kementerian Sosial sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Program Raskin;

6. Kepmenko Kesra No. 57 Tahun 2012 tentang Tim Koordinasi Raskin Pusat;

7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 900/2634/SJ tahun 2013 tentang pengalokasian Biaya Penyaluran Raskin dari Titik Distribusi ke Titik Bagi.

Penyaluran Raskin dimulai dengan permintaan alokasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota setempat melalui Surat Pemerintah Alokasi (SPA). Kadivre/Kasubdivre yang bertanggung jawab atas area tersebut ditunjukkan SPA. Tim koordinasi Raskin setempat membahas jadwal pendistribusian SPA agar masyarakat memiliki waktu, tenaga, dan uang tunai untuk mempersiapkan pendistribusian. Tim Koordinasi Raskin memeriksa kondisi beras Raskin yang akan didistribusikan sebelum dijadwalkan pengirimannya ke Titik Distribusi. Beras raskin kemudian dikirim ke titik distribusi asal berdasarkan data RTS yang terkumpul di daerah tersebut. BULOG tidak menambah atau mengurangi apapun. Musyawarah Desa/Kelurahan dan Musyawarah Kecamatan memiliki kewenangan atas setiap perubahan data RTS (Rumah Tangga Sasaran). Alur Penyaluran Raskin dari Bulog ke RTS digambarkan pada diagram berikut.



Gambar 1. Peta Alur Distribusi Raskin dari BULOG ke RTS

Program Raskin bertujuan untuk meringankan beban keuangan Rumah Tangga Sasaran dengan memenuhi sebahagian kebutuhan berasnya. Program Raskin 2015 bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran sebesar 15.530.897 RTS dalam mengatasi kebutuhan pangan beras dengan menyalurkan beras bersubsidi dengan alokasi bulanan sebesar 15 kg/RTS. Berikut ini ialah manfaat yang akan diwujudkan sebagai hasil dari pelaksanaan Program Raskin:

1. Kestabilan harga pasar beras
2. Menjaga cadangan pangan nasional dan mengendalikan inflasi melalui keterlibatan pemerintah dengan menentukan harga beras bersubsidi sebesar Rp. 1.600,-/kg.

3. Meningkatkan ketahanan pangan serta perlindungan sosial dan metode penanggulangan kemiskinan di tingkat keluarga.
4. RTS memiliki akses pangan yang lebih besar secara fisik (beras tersedia di TD) dan ekonomi (harga jual yang terjangkau).
5. Sebagai pasar hasil pertanian padi.
6. Membantu pembangunan ekonomi daerah.

2.7 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan dan menunjang penelitian “Implementasi Distribusi Bantuan Sosial Masyarakat Miskin di Kelurahan Bontoala Parang Kecamatan Bontoala Kota Makassar”, penulis melakukan peninjauan terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang pada dasarnya memiliki tema yang sama yaitu terkait dengan Bantuan Sosial. Hal ini dianggap cukup penting penulis karena sekaligus untuk mengetahui perbedaan ataupun kesamaan penelitian terdahulu dan sekarang.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama penelitian	Judul & Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1.	Suryadi (2016)	Implementasi Program Beras Miskin (RASKIN) Tahun 2015 Dikelurahan Pringsewu barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Implementasi Program Raskin 2015 di Kelurahan Pringsewu Barat. 2. Faktor Apa Sajakah yang mendukung dan menghambat Implementasi Program Raskin di Kelurahan Pringsewu Barat Tahun 2015 	Pelaksanaan Program Beras Miskin (RASKIN) di Desa Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu tahun 2015 tidak terlaksana

				sesuai rencana, hal ini disebabkan tidak terpenuhinya indikator keberhasilan Raskin 5T baik jumlah, harga, mutu, sasaran, dan waktu.
2.	Supriatna and Ristanti (2018)	Implementasi Kebijakan Program Beras Sejahtera di Kabupaten Pangandaran (2018)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Program Raskin Yang dilakukan di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 7.A Tahun 2016 tentang pedoman Pengelolaan dan pelaksanaan Program Beras Miskin/beras Sejahtera di Kabupaten Pangandaran 2. Apa saja faktor-faktor yang menjadikan penghambat atau kendala dalam implementasi kebijakan program beras Raskin/Rastra di desa babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran 	Menurut penjelasan peneliti, pelaksanaan kebijakan Program Raskin/Rastra di Desa Babakan belum terlaksana semulus yang seharusnya, dan masih terdapat berbagai penghambat dalam mengelola dan melaksanakan program Raskin/Rastra, antara lain: 1) kurangnya komunikasi. 2) kelangkaan sumber daya

3.	Astutik (2019)	Implementasi Distribusi Beras miskin dalam Prinsip Keadilan Ekonomi Islam (2019)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana implementasi distribusi beras miskin di Desa Kepuh Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk. 2. Bagaimana implementasi distribusi beras miskin dalam prinsip keadilan ekonomi islam di Desa Kepuh Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk. 	Penyaluran beras miskin di Desa Kepuh Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk yaitu pembagian beras miskin yang merata kepada seluruh masyarakat berpenghasilan rendah untu membantu pemenuhan kebutuhan pokoknya.
----	----------------	--	---	--

pada penelitian terdahulu dapat kita lihat jika penulis mengambil 3 contoh penelitian, yaitu:

- 1) Penelitian Pertama yang diteliti oleh Suryadi (2016) membahas tentang Implementasi Program Beras Miskin (RASKIN) tahun 2015 Dikelurahan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, dengan rumusan masalah yang digunakan ialah:
 - a) Bagaimana Implementasi Program Raskin 2015 di Kelurahan Pringsewu Barat.
 - b) Faktor Apa Sajakah yang Mendukung dan Menghambat Implementasi Program Raskin di Kelurahan Pringsewu Barat Tahun 2015.
- 2) Penelitian Kedua yang diteliti oleh Supriatna and Ristanti (2018) membahas tentang Implementasi Kebijakan Program Beras

Sejahtera di Kabupaten Pengandaran, dengan rumusan masalah yang digunakan ialah:

- a) Bagaimana Implementasi Kebijakan Program Raskin Yang dilakukan di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pengandaran Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 7.A tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelaksanaan Program Beras Miskin/Beras Sejahtera di kabupaten Pangandaran.
 - b) Apa Saja Faktor-Faktor yang Menjadikan Kendala Dalam Implementasi Kebijakan Program Beras Raskin/Rastra di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran.
- 3) Penelitian Ketiga yang diteliti oleh Astutik (2019)membahas tentang Implementasi Distribusi Beras Miskin dalam Prinsip Keadilan Ekonomi Islam, dengan rumusan masalah ialah:
- a) Bagaimana Implementasi Distribusi Beras Miskin di Desa Kepuh Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk
 - b) Bagaimana Implementasi Distribusi Beras Miskin Dalam Prinsip Keadilan Ekonomi islam di Desa kepuh Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk.

Sedangkan penulis sendiri membahas tentang Implementasi Distribusi bantuan Sosial Masyarakat Miskin Kelurahan Bontoala Parang Kecamatan Bontoala, dengan rumusan masalah ialah:

a) Bagaimana Proses Distribusi Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Miskin di Kelurahan Bontoala Parang Kecamatan Bontoala.

b) Bagaimana Efektivitas Distribusi Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Miskin di Kelurahan Bontoala Parang Kecamatan Bontoala.

Hal yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang diteliti saat ini terdapat di Rumusan Masalah, di lihat dari rumusan masalah yang terdapat di penelitian terdahulu tidak sama dengan rumusan masalah yang saat ini penulis ingin teliti.

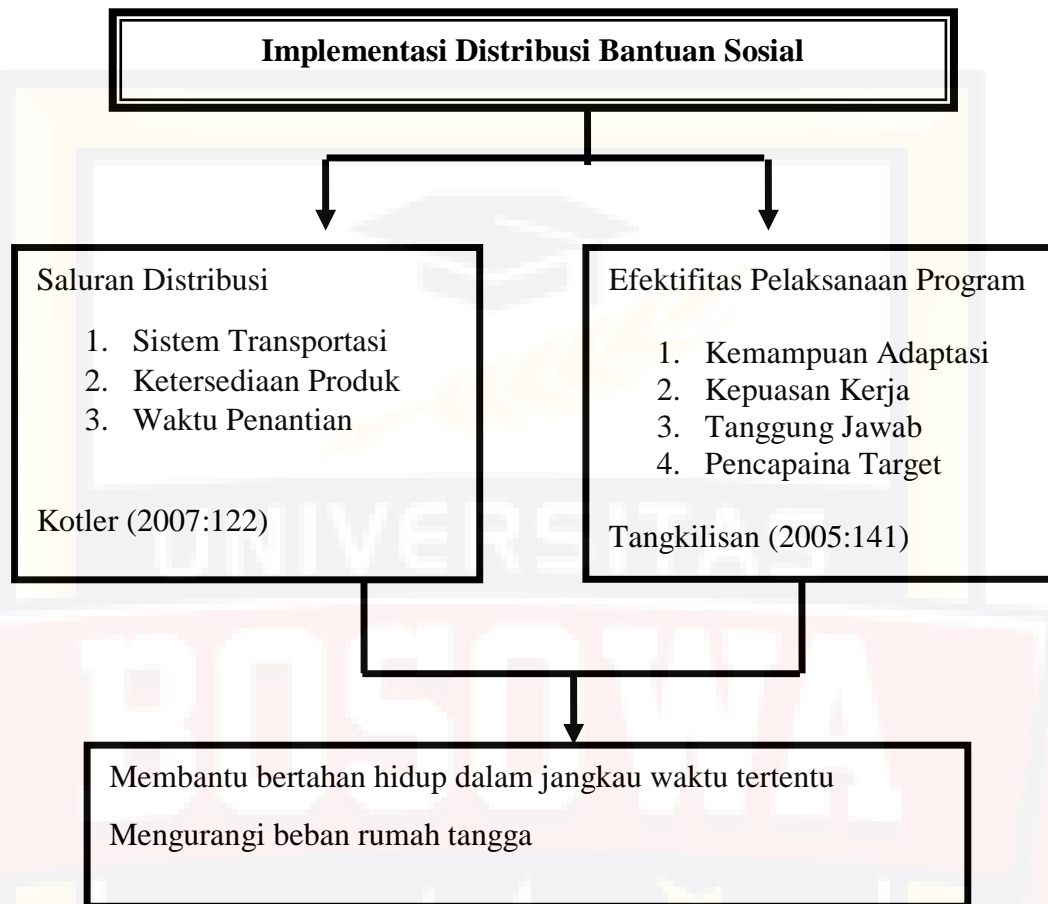
2.8 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan uraian sementara terhadap gejala yang menjadi objek suatu penelitian berdasarkan tinjauan pustaka yang sudah diuraikan sebelumnya atau bagaimana teori berkaitan dengan sejumlah aspek yang sudah teridentifikasi dengan permasalahan yang penting (Sugiyono, 2009: 91). Di bawah ini dipaparkan kerangka yang berguna untuk menuntun, sekaligus menggambarkan alur pikir sebagai dasar analisis.

Program Raskin merupakan inisiatif pemerintah yang memiliki tujuan untuk membangun ketahanan pangan nasional dengan memastikan bahwa rumah tangga sasaran memiliki akses pangan baik secara fisik (melalui ketersediaan beras di stasiun distribusi) maupun secara ekonomi (melalui harga jual yang murah). Tujuannya untuk

meringankan beban keuangan rumah tangga sasaran dengan menyediakan beras untuk mencukupi kebutuhan pangan pokok tertentu.

Dalam studi ini, program Raskin mengacu pada program penanggulangan kemiskinan klaster satu yang telah dilaksanakan sejak tahun 1998 dan mencakup penyaluran bantuan sosial berbasis keluarga. Pemerintah membantu masyarakat miskin dalam memperoleh hak mereka atas pangan melalui inisiatif pemerintah. Jika setiap RTS-PM memiliki empat individu dan rata-rata asupan beras nasional sekitar 113,7 kg/per kapita/tahun, sehingga program Raskin telah menyumbang 39,6 persen kebutuhan beras bulanan untuk setiap RTS. Adapun gambaran menunjukkan bantuan sosial untuk masyarakat kurang mampu di Kecamatan Bontoala Parang, Kabupaten Bontoala, Kota Makassar dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 2. Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini ialah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dengan menjelaskan atau meringkas suatu masalah, penelitian kualitatif seharusnya dapat memberikan informasi kualitatif maka nantinya dapat lebih fokus pada permasalahan proses dan makna. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu berusaha menemukan atau menggambarkan realitas peristiwa yang diteliti, atau bersifat komparatif, yaitu berusaha menghubungkan dengan faktor-faktor lain (Sugiyono 2013, 11).

Menurut Sugiyono (2013, 1) penelitian kualitatif pada umumnya didefinisikan sebagai metode penelitian yang diterapkan untuk meneliti pada kondisi objek yang sifatnya alami, dimana kemudian peneliti diposisikan sebagai instrumen kunci, dan selanjutnya teknik dalam mengumpulkan data dilaksanakan secara triangulasi atau gabungan, analisis data yang sifatnya induktif, serta hasil penelitian yang menekankan pada makna.

Dalam proses dan juga makna dari penelitian kualitatif lebih ditonjolkan. Dimana landasan teori akan digunakan sebagai panduan agar fokus penelitian selaras dengan realitas yang didapatkan di lapangan. Sementara itu juga keberadaan landasan teori akan memberi manfaat sebagai latar belakang dan sebagai bahan pengkajian hasil penelitian.

Pada penelitian ini, penulis juga menggunakan pendekatan komunikasi informasi, dimana peneliti secara langsung mendapatkan informasi dari

informan. Peneliti akan mengimplementasikan metode pendekatan ini kepada orang-orang yang dianggap berkaitan untuk diangkat menjadi narasumber atau informan sehingga dapat menyampaikan keterangan dan informasi merujuk pada penelitian yang akan dilaksanakan.

3.2 Lokasi Penelitian

Terkait dengan judul penelitian diatas, maka peneliti melaksanakan penelitian di Kelurahan Bontoala Parang Kecamatan Bontoala Kota Makassar, yang berada di Jalan Satangnga No. 63 Makassar (90157). Adapun subjek penelitian yaitu Bapak Lurah dan Staf Kantor Kelurahan Bontoala Parang dan penerima Manfaat Raskin.

3.3. Deskripsi Fokus dan Indikator Penelitian

Sugiyono (2006:54) berpendapat “Proses menentukan informan ialah dengan peneliti menyeleksi pihak-pihak tertentu yang dianggap menyampaikan data yang esensial, kemudian berdasarkan data atau informasi yang membahas hasil penelitian yang sudah dilaksanakan,” (Moleong 2006, 92).

Berkaitan dengan perihal tersebut, penelitian ini berfokus pada Implementasi Distribusi Bantuan Sosial yang kemudian dijabarkan pada indikator sebagai berikut:

1. Saluran distribusi ialah lembaga distributor yang terlibat dalam distribusi atau pengiriman barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Indikator saluran distribusi pandangan Kotler and Keller (2007) Bantuan Sosial sebagai salah satu wujud program dalam membantu penyaluran bantuan terdiri dari:

- a. Sistem Transportasi: Ini mengacu pada bagaimana barang dikirim atau didistribusikan.
- b. Ketersediaan produk: jumlah produk yang disediakan untuk konsumen oleh perusahaan.
- c. Waktu tunggu: jumlah waktu yang harus dimiliki pelanggan untuk menunggu produk yang diinginkan.

Untuk mengetahui saluran distribusi tersebut, penulis akan mendapatkan data dari Kantor Lurah Bontoala Parang dengan mewawancarai Pak Lurah dan Staf Penanggung Jawab RASKIN

2. Efektivitas program adalah penilaian atau pengukuran sejauh mana kegiatan dalam program yang telah dilaksanakan telah mampu memenuhi tujuan awal program. Indikator Efektifitas program menurut Tangkilisan (2005) Bantuan Sosial yang dijalankan oleh pemerintahan Kota Makassar yang terdiri dari:
 - e. Kemampuan adaptasi: keberhasilan suatu organisasi ditentukan oleh kemampuannya untuk menyesuaikan terhadap peristiwa/hal yang berubah baik di lingkup internal atauun eksternal organisasi.
 - f. Kepuasan kerja: keadaan pikiran yang dialami oleh seluruh anggota organisasi yang dapat memberikan kenyamanan dan dorongan untuk meningkatkan kinerja organisasi.

- g. Tanggung jawab: organisasi mampu mengerjakan tanggung jawab yang ditetapkan sebelumnya dan menghadapi dan menyelesaikan kesulitan yang muncul dalam operasinya.
- h. Pencapaian Target: Dalam hal ini, pencapaian target didefinisikan sebagai sejauh mana tujuan organisasi dapat dicapai dengan baik. Kondisi tersebut bisa ditunjukkan dengan seberapa jauh tujuan organisasi diimplementasikan dalam mewujudkan sasaran berdasarkan tujuan yang sudah ditentukan.

Untuk mengetahui efektivitas Program tersebut maka penulis akan mendapatkan data dari masyarakat sekitar.

3.4.Sumber Data Penelitian

Dikemukakan oleh Sugiyono (2013, 2) "*bahwa tolak ukur data dalam penelitian kualitatif ialah data yang sifatnya pasti*". Data pasti yaitu data yang bukan hanya sekadar terlihat, terucap, tetapi data yang memberikan arti di balik data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder.

3.3.1 Data Primer

Data primer ialah informasi langsung dari lapangan yang dikumpulkan oleh peneliti (Lofland dalam Moleong 2006, 157). Melalui penelitian ini, data primer yang dikumpulkan dilakukan melalui wawancara mendalam antara peneliti dan informan yang menggunakan pendekatan tatap muka.

Peneliti mendatangi lokasi penelitian guna pengumpulan data dalam sejumlah format, antara lain rekaman audio wawancara dan foto aktivitas lapangan. Data yang dikumpulkan dari masyarakat Kota Makassar dapat dijadikan sebagai data primer.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder yaitu “informasi yang diterima dari data primer yang dibutuhkan sebagai pelengkap informasi yang dihasilkan dari data sekunder dalam penelitian” (Lofland dalam Moleong 2006, 157).

Data sekunder mengacu pada informasi yang berasal dari buku dan referensi lain yang berhubungan dengan Distribusi Bantuan Sosial Raskin di Masyarakat Miskin. Sumber data sekunder dapat diperoleh dari:

- a. Dokumen Kantor Terkait
- b. Penelusuran Data Online
- c. Dokumentasi
- d. Buku/Jurnal

3.5 Informan Penelitian

Moleng (2004 : 132) memberikan pandangan tersendiri bahwa informan penelitian yaitu:

“seorang yang ditugaskan untuk memberi informasi mengenai keadaan dan kondisi penelitian lainnya”.

Informan yang dalam hal ini yaitu sejumlah pihak yang bisa memberi informasi yang berhubungan dengan Implementasi Distribusi Bantuan Sosial Masyarakat Miskin Kelurahan Bontoala Parang Kecamatan Bontoala Kota Makassar. Informan penelitian yang dipergunakan diantaranya dari:

1. Pak Lurah
2. Staf kantor lurah
3. Penanggung jawab Titik Distribusi Tingkat Kelurahan
4. Masyarakat

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2012, 63) menyebutkan terdapat empat jenis teknik pengumpulan data: observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Pada penelitian ini, peneliti menerapkan teknik triangulasi, yaitu penggabungan tiga teknik pengumpulan data yang berbeda (observasi, wawancara, dan dokumentasi).

3.6.1 Observasi

Observasi ialah cara mengumpulkan data dengan turun langsung ke lapangan atau lokasi penelitian, dengan tujuan untuk melakukan pengamatan. Menurut Sugiyono

(2017: 226) ”bahwa pengamatan ialah proses mengumpulkan data yang dilaksanakan dengan cara sistematis hal-hal dengan penyelidikan penelitian. Metode penelitian ini memerlukan pemeriksaan langsung terhadap kondisi objektif sasaran penelitian di lapangan”. Strategi tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang luas dari subjek yang peneliti teliti. Peneliti melakukan observasi untuk memperoleh gambaran yang lebih akurat terkait subjek yang diteliti, dimana peneliti mengumpulkan data di tempat atau instansi terkait.

3.6.2 Wawancara

Wawancara ialah teknik mengumpulkan data yang memerlukan pengajuan pertanyaan langsung kepada responden/informan untuk membuktikan bahwa faktanya akurat. Sehingga dengan hal inilah akan kemudian mendapatkan penjelasan langsung yang sifatnya lebih akurat. Dalam kegiatan wawancara, tekniknya yakni dengan mengusulkan beberapa pertanyaan secara langsung kepada informan sesuai maksud atau tujuan penelitian. Teknik ini akan dilaksanakan dengan mencatat disesuaikan pedoman wawancara yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian teknik ini pula dikerjakan dengan beberapa kali hingga

mendapatkan data yang dianggap jelas dan sesuai dengan yang diharapkan.

3.6.3 Dokumentasi

“Dokumen merupakan rekaman peristiwa yang telah berlalu” Sugiyono (2012, 82–83). Dokumen dapat berupa sastra, foto, atau karya kolosal seseorang. Jadi, dalam hal ini, dokumentasi yang direncanakan penulis adalah warisan tertulis, serta pengambilan gambar atau foto dan hukum-hukum yang relevan dengan fokus penelitian.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data pada umumnya, selain dimanfaatkan untuk menyangkal klaim bahwa penelitian kualitatif tidak ilmiah merupakan komponen integral dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong 2006, 320). Validitas data diperiksa untuk melihat apakah penelitian dilaksanakan secara ilmiah dan untuk melihat apakah data yang didapatkan akurat. Dalam penelitian kualitatif, penilaian kredibilitas, transferabilitas, ketergantungan, dan konfirmabilitas digunakan untuk menentukan validitas data (Sugiyono, 2007:270)

Sangat penting untuk menilai keabsahan data dalam penelitian kualitatif untuk mempertanggungjawabkannya sebagai penelitian ilmiah. Dimungkinkan untuk melakukan uji validitas data.

3.7.1 *Credibility* (derajat kepercayaan)

Menguji kredibilitas (*credibility*) atau kepercayaan terhadap data penelitian yang diberikan oleh peneliti sehingga hasil penelitian tidak dipertanyakan sebagai sebuah karya ilmiah.

a. Perpanjangan pengamatan

Pengamatan yang ekstensif mampu mengembangkan kredibilitas dan kebergantungan data. Yang dimaksud dengan “perluasan observasi” adalah proyek penelitian yang kembali ke lapangan, melaksanakan observasi, dan melaksanakan wawancara dengan sumber data yang digunakan sebelumnya dan baru. Pengamatan yang diperluas menyiratkan bahwa hubungan antara penelitian dan sumber akan menjadi lebih terjerat, akrab, dan terbuka, dan rasa saling percaya akan berkembang, menghasilkan pengetahuan yang semakin lengkap.

Tujuan memperluas observasi untuk menilai kredibilitas data penelitian adalah untuk menguji data yang sudah dikumpulkan. Sesudah data yang didapatkan dimasukkan kembali ke dalam field benar atau salah, terdapat perubahan atau perlu diperbaiki. Setelah kembali ke lapangan dan memastikan bahwa data yang terkumpul dapat dipertanggungjawabkan atau nemar

artinya dapat dipercaya, maka pengamatan harus diakhiri.

b. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian

Peningkatan akurasi atau ketekunan diperlukan dari waktu ke waktu sehingga keakuratan data dan urutan kronologis kejadian dapat dicatat secara akurat dan metodis. Meningkatkan akurasi adalah salah satu teknik untuk mengatur dan memeriksa pekerjaan untuk melihat seperti apa data yang dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sesuai.

Membaca dan berbagi referensi, buku, hasil penelitian sebelumnya, dan dokumen yang relevan, serta melakukan perbandingan hasil penelitian yang diperoleh, dapat membantu meningkatkan ketekunan penelitian. Sehingga penelitian akan lebih berhati-hati saat menyiapkan laporan, sehingga menghasilkan temuan yang lebih berkualitas.

c. Triangulasi

Wiliam Wiersma dalam Sugiono (2007) mengartikan triangulasi dalam uji kredibilitas sebagai sumber dengan berbagai pemeriksaan data dari sejumlah sumber dengan pelbagai waktu. Oleh sebab itu, ada triangulasi sumber,

triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu
(Sugiyono, 2007:273)

3.7.2 *Transferability* (keteralihan)

Hal ini secara empiris bertumpu pada persamaan antara konteks pengirim dan penerima. Agar mencapai transfer ini, seorang peneliti harus melakukan pencarian dan pengumpulan peristiwa empirik yang berkaitan dengan konteks yang sama. Akibatnya, jika peneliti ingin merumuskan kesimpulan tentang transfer, maka harus memberikan data deskriptif yang sesuai. Peneliti perlu melaksanakan studi kecil untuk tujuan ini untuk memastikan upaya verifikasi.

3.7.3 *Dependability* (kebergantungan)

Kebergantungan ialah istilah yang lebih luas daripada reabilitas. Hal ini disebabkan tinjauan dari sudut pandang bahwa konsep ini mempertimbangkan segala yang ada pada reabilitas itu sendiri serta elemen-elemen penting lainnya.

3.7.4 *Confirmability* (kepastian)

Objektivitas dan subjektivitas suatu hal berbeda dari orang ke orang. Selanjutnya, masih ada komponen kualitas dalam konsep objektivitas. Itu berasal dari gagasan bahwa

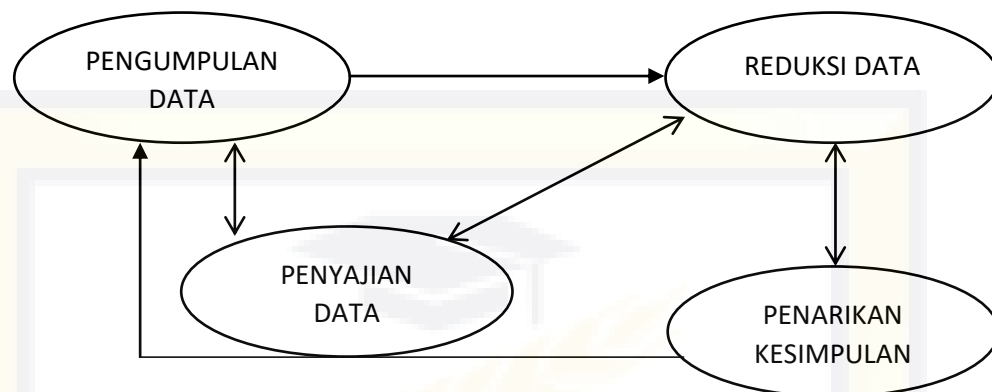
jika sesuatu adalah suatu objek, itu dapat dipercaya, diverifikasi secara faktual, dan dipastikan. Subyektif mengacu pada sesuatu yang tidak dapat dipercaya atau melenceng. Transformasi dari defenisi konsep objektivitas-subjektivitas menjadi kepastian didasarkan pada gagasan terakhir ini.

3.8 Teknik Analisis Data

Sugiyono (2012, 89) mengemukakan analisis data sebagai:

“proses pencarian dan penyusunan data secara sistematis, seperti yang ditemukan dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan mengkategorikan data, memecahnya menjadi unit-unit, mensintesis, menyusun data menjadi pola, memutuskan mana yang pokok dan apa yang perlu diteliti, dan menarik kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain”.

Sedangkan Milen dan Hubberman (Sugiyono, 2007:204) berpendapat, teknik analisis data peneliti mencakup “pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan terakhir penarikan kesimpulan atau verifikasi”.



Gambar 3. Teknik Analisis Data Miles dan Huberman (Matthew and Huberman 1999)

3.8.1 Pengumpulan Data

Teknik wawancara dan observasi dipergunakan untuk mendapatkan data dari sumber data. Peneliti dapat langsung menilai data yang diperoleh saat wawancara. Jika tanggapan tidak cukup atau tidak memuaskan, peneliti dapat mengulangi kueri sampai data dianggap valid.

3.8.2 Reduksi Data

Reduksi data ialah proses perbaikan data dengan menghilangkan data yang tidak lagi dibutuhkan atau relevan, serta menambahkan data yang dianggap hilang. Dalam hal tema dan pola, reduksi data memerlukan meringkas, memilih elemen yang paling signifikan, dan memfokuskannya. Akibatnya, data yang akan direduksi menyajikan penggambaran yang lebih pasti, sehingga

memberi kemudahan peneliti dalam memperoleh data tambahan dan menelusurinya jika dibutuhkan (Sugiyono, 2007: 247).

3.8.3 Sajian Data

Penyajian data yakni informasi yang memungkinkan peneliti menarik kesimpulan dari temuannya. Melihat presentasi data dapat membantu dalam menafsirkan apa yang terjadi dan memungkinkan melaksanakan apa saja dengan analisis atau mengambil tindakan tambahan tergantung pada apa yang telah Anda pelajari. Menurut Matthew and Huberman (1999), data penelitian kualitatif dapat disajikan dalam deskripsi singkat, bagan, korelasi kategori, bagan alur, dan sejenisnya. “Tulisan naratif paling sering dipakai untuk mengkomunikasikan data dalam penelitian kualitatif,” katanya (Sugiyono, 2007: 249)

3.8.4 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data

Verifikasi data merupakan langkah terakhir dalam tahap analisis data. Jika temuan awal yang ditemukan masih bersifat sementara, maka dilakukan verifikasi data, dan jika tidak diikuti dengan bukti pelengkap yang kuat sebagai pendukung langkah dalam mengumpulkan data berikutnya, maka akan dilakukan perubahan. Jika kesimpulan yang dicapai pada awalnya teratur dilengkapi

oleh bukti yang dapat diandalkan ketika tim peneliti mengulang ke lokasi untuk mengumpulkan data, maka temuan tersebut kredibel atau dapat dipercaya (Sugiyono, 2007).

Pada penelitian kualitatif, temuan bisa saja mampu menjawab pertanyaan penelitian yang ditetapkan pada awal penyelidikan. Ada kalanya temuan yang dicapai tidak cukup untuk memecahkan masalah. Hal ini disebabkan persoalan yang muncul dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan dapat berkembang setelah penelitian tersebut masuk ke lapangan, yang sejalan dengan sifat penelitian kualitatif itu sendiri.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Profil Kota Makassar

Makassar atau yang sebelumnya dikenal dengan Ujung Pandang merupakan ibu kota provinsi Sulawesi selatan yang terletak dibagian selatan pulau Sulawesi, terletak antara $119^{\circ}24'17''38''$ Bujur Timur dan $5^{\circ}8'6''19''$ Lintang selatan yang berbatasan sebelah utara dengan kabupaten Maros, sebelah timur Kabupaten Maros, sebelah selatan kabupaten Gowa dan sebelah barat adalah selat Makassar. Kota Makassar memiliki topografi dengan kemiringan lahan 0-2'' (datar) dan kemiringan lahan 3-15'' (bergelombang). Luas wilayah kota Makassar tercatat 175,77 km persegi. Kota Makassar memiliki iklim sedang hingga tropis memiliki suhu udara rata-rata berkisar antara 26°C sampai dengan 29°C .

Kota Makassar secara administratif terbagi menjadi 15 kecamatan, masing-masing dengan 153 kelurahan di dalamnya. Tujuh dari 15 kecamatan berbatasan dengan pantai, yakni Tamalate, Mariso, Wajo, Ujung Tanah, Tallo, Tamalanrea, dan Biringkanaya. Di dalam bata-batas tersebut antara lain:

- a. Batas Utara : Kabupaten Maros
- b. Batas Timur : Kabupaten Maros
- c. Batas Selatan : Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar

d. Batas Barat : Selat Makassar

Secara umum topografi Kota Makassar diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu:

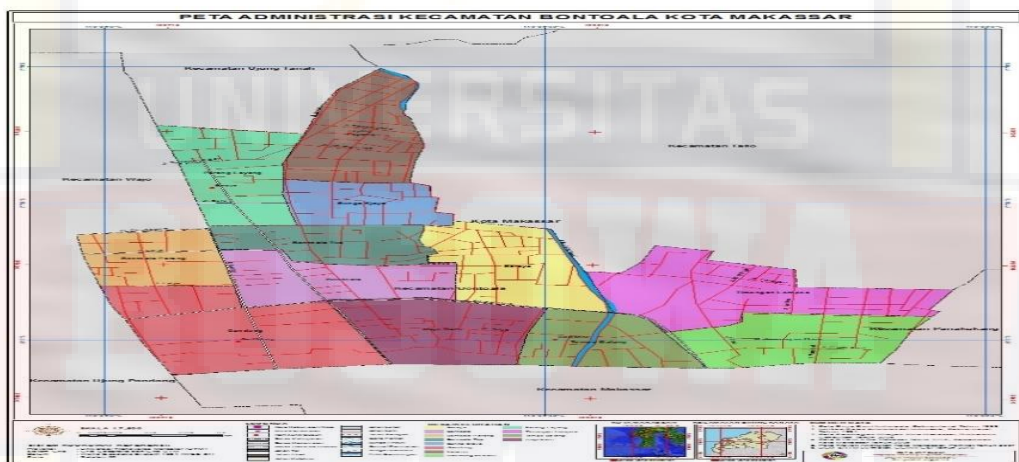
- a. Bagian Barat ke arah Utara relatif rendah dekat dengan pesisir pantai.
- b. Bagian Timur dengan keadaan topografi berbukit seperti di Kelurahan Antang Kecamatan Panakukang.

Kota Makassar (Makassar, Mangkasar, Ujung Pandang (1971-hingga sekarang) adalah salah satu kota metropolitan di Indonesia dan sekaligus sebagai ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Kota Makassar merupakan kota terbesar keempat di Indonesia dan terbesar di Kawasan Timur Indonesia (sulselprov.go.id) dan tahun 2019 sesuai dengan populasi penduduk dan luas wilayah dimana jumlah penduduknya mencapai 1,7 juta jiwa dengan luas wilayah 199,26 kilometer (makassarkota.go.id).

4.1.2 Kecamatan Bontoala

Kecamatan Bontoala merupakan salah satu dari 14 Kecamatan di Kota Makassar yang berbatasan dengan Kecamatan Ujung Tanah di sebelah utara, Kecamatan Tallo di Sebelah Timur, Kecamatan Makassar di sebelah selatan dan di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Ujung Pandang.

Kecamatan Bontoala memiliki Luas wilayah 2,10 Km² terdiri dari 12 Kelurahan diantaranya Kelurahan Tompo Balang, Kelurahan Gaddong, Kelurahan Bunga Ejaya, Kelurahan Malimongan Baru, Kelurahan Timungan Lompoa, Kelurahan Layang, Kelurahan Bontoala, Kelurahan Bontoala Parang, Kelurahan Parang Layang, Kelurahan Wajo Baru, Kelurahan Bontoala Tua, dan Kelurahan Malimongan Baru.



Gambar 4. Peta Kecamatan Bontoala

Sumber : petatematikindo.files.wordpress.com

Berdasarkan data yang bersumber dari pendataan Kecamatan Bontoala pada tahun 2019, memperlihatkan bahwa Kecamatan Bontoala merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar ke sebelas (11) di Kota Makassar dengan jumlah penduduk 57.197 yang lumayan besar di berbagai kelurahan. Jumlah penduduk tersebut terdiri dari 26.886 untuk penduduk laki-laki dan 29.311 untuk penduduk perempuan. Penjelasan lebih lanjut akan dipaparkan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Jumlah Penduduk Kota Makassar Berdasarkan GenderSumber: Badan Pusat Statistika Indonesia (<https://makassarkota.bps.go.id/>)

Kecamatan	2019	
	Jumlah Penduduk (jiwa)	
	Laki-laki	Perempuan
Mariso	30.609	29.890
Mamajang	30.129	31.323
Tamalate	102.128	103.413
Rappocini	82.162	87.959
Makassar	42.553	42.962
Ujung pandang	13.716	15.338
Wajo	15.470	15.983
Bontoala	27.886	29.311
Ujung Tanah	18.037	17.497
Sengkarang	7.239	7.292
Tallo	70.303	70.027
Panakukang	73.971	75.693
Manggala	75.094	74.393
Biringkanaya	110.138	110.318
Tamalanrea	56.533	59.310
Kota Makssar	755.968	770.709

Berikut adalah Jumlah Rumah Tangga dan Penduduk Tahun 2019 di

Kecamatan Bontoala Parang:

Tabel 3. Jumlah Rumah Tangga di Kecamatan Bontoala

Sumber : Kantor Kecamatan Bontoala Kota Makassar

No	Kelurahan	Luas (km ²)	Rumah Tangga
1	Gaddong	0.25	973
2	Wajo Baru	0.13	1.012
3	Tompo Balang	0.11	724
4	Mallimoga Baru	0.15	815
5	Timungan Lompoa	0.19	1.053
6	Baraya	0.21	1.248
7	Bontoala	0.13	716
8	Bontoala Parang	0.23	1.122
9	Bontoala Tua	0.12	907
10	Bunga Ejaya	0.18	1.140
11	Layang	0.21	1.804
12	Parang Layang	0.19	918
Jumlah		2.10	5.060

4.1.3 Kelurahan Bontoala Parang

Kelurahan Bontoala Parang ialah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kota yang berkedudukan kerja di Kecamatan Bontoala Makassar. Kelurahan Bontoala terletak di Jalan Satangnga No.53-71 dengan luas pemukiman 11.090 ha/m² , Kelurahan Bontoala memiliki RW 4 dan RT 15. Dengan batas wilayah yaitu di sebelah utara terdapat Kelurahan Bontoala tua, sebelah selatan Kelurahan Gaddong, sebelah timur Kelurahan Bontoala, dan sebelah barat terdapat Kelurahan Wajo Baru.



Gambar 5. Lokasi Kelurahan Bontoala

Berikut ini adalah Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Di Kelurahan Bontoala Parang Kecamatan Bontoala Kota Makassar:

Tabel 4. Jumlah penduduk di wilayah Kelurahan Bontoala

Sumber : Data Kelurahan Bontoala Parang

No	RW	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH LK/PR
1.	RW 01	650 Jiwa	680 Jiwa	1.330 Jiwa
2.	RW 02	540 Jiwa	525 Jiwa	1.065 Jiwa
3.	RW 03	400 Jiwa	460 Jiwa	860 Jiwa
4.	RW 04	653 Jiwa	690 Jiwa	1.343 Jiwa
JUMLAH		2.243 Jiwa	2.355 Jiwa	4.598 Jiwa

Kelurahan Bontoala Parang adalah salah satu kelurahan yang penduduknya tergolong ekonomi rendah dalam jumlah tinggi dengan kurang lebih 3.000 jiwa hingga akhir pertengahan tahun 2020. Saat ini Kelurahan Bontoala Parang dipimpin oleh H Nasrun, S.IP, M.Si.

Kelurahan Bontoala Parang merupakan salah satu kelurahan yang jumlah penduduk miskinnya cukup tinggi. Maka dari itu Kelurahan Bontoala Parang sangat memerlukan sebuah program sebagai penunjang perbaikan kualitas sosial masyarakat. Keberadaan Program Raskin di Kelurahan Bontoala Parang merupakan wujud nyata dari upaya meminimalisir kondisi kemiskinan masyarakat sesuai dengan aturan presiden no.69 tahun 2015 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan serta hingga

kebijakan Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Nontunai. Keberadaan Raskin di Kelurahan Bontoala Parang adalah salah satu upaya untuk membantu penanganan kesejahteraan sosial terhadap masyarakat miskin di Kelurahan Bontoala Parang yang memiliki 1.122 kepala keluarga.

4.2 Hasil Penelitian

Selama beberapa tahun terakhir (2006-2010), program RASKIN telah berjalan, dan evaluasi pelaksanaannya telah dilakukan. Karena itu, kehidupan mereka terus berjalan sesuai dengan pola tradisional yang telah ada sejak lama dan diperkuat oleh lingkungan mereka.

Penerima Manfaat program Sembako yaitu keluarga dengan kondisi sosial ekonomi paling rendah di daerah pelaksanaan, kemudian disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program Sembako, yang namanya tercatat dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) program Sembako dan penetapannya ditentukan oleh KPA di Kementerian Sosial.

DPM program Sembako bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dapat diakses oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota melalui aplikasi SIKS-NG menu Bantuan Sosial Pangan (BSP). DPM program Sembako yang telah diverifikasi dan difinalisasi oleh Pemerintah Daerah serta disahkan oleh Bupati/Wali Kota dilaporkan kepada Kementerian Sosial melalui aplikasi SIKS-NG menu BSP. (Sumber: Program umum pedoman sembako 2020)

Hasil penelitian ini dirangkum melalui indikator yang telah dijabarkan sebelumnya, yakni:

4.2.1 Proses distribusi bantuan sosial (RASKIN) bagi masyarakat miskin di Kelurahan Bontoala Parang Kecamatan Bontoala Kota Makassar

Berdasarkan informasi-informasi yang telah diperoleh peneliti, pada pelaksanaan kegiatan pendistribusian beras miskin (raskin) di Kelurahan Bontoala Parang Kecamatan Bontoala Kota Makassar ini berawal pada tahun 2010 sampai tahun 2021. Untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok, distribusi beras miskin disalurkan pada 2018 sesuai dengan pedoman distribusi beras dasar pemerintah.

Tabel 5. Tahap Proses Penyaluran Raskin

No	Tahap	Wilayah	Penanggungjawab
1	Tahap I	Pusat	Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Menteri (TNP2K) Koordinator
2	Tahap II	Provinsi	Tim Koordinasi Raskin Provinsi, Gubernur
3	Tahap III	Kabupaten	Tim Koordinasi Raskin kabupaten, Bupati
4	Tahap IV	Kecamatan	Tim Koordinasi Raskin Kabupaten, Bupati/Walikota
5	Tahap V	Kelurahan	Tim Koordinasi Raskin Kelurahan, kepala desa atau Lurah atau Kepala Desa Pemerintah Setingkat
Masyarakat Penerima Raskin			

Tabel di atas memperlihatkan bagaimana prosedur penerimaan dan juga pendistribusian raskin tersebut harus dilakukan secara bertahap sesuai

dengan kedudukan yang dimiliki. Dalam artian pihak yang terkait perlu menempatkan posisinya seperti dengan ketentuan awal dan menjalankan prosedur yang sudah diatur sebelumnya.

Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (RASKIN) merupakan program nasional lintas sektoral yang membantu masyarakat berpenghasilan rendah memenuhi kebutuhan pangan beras dalam skala horizontal dan vertikal. Kontribusi dilakukan secara horizontal oleh seluruh kementerian dan lembaga terkait [K-L] berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Kebijakan program dibuat oleh Pemerintah Pusat, namun pelaksanaannya sebagian besar diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Dalam rangka meningkatkan efektivitas Program Raskin, peran pemerintah daerah sangat penting.

4.2.1.1 Sistem Transportasi

Sistem transportasi adalah alat utama dalam hal distribusi dan pemasaran produk. Pengiriman barang melalui darat dan laut tidak mungkin dilakukan tanpa alat transportasi. Untuk pendistribusian barang, sarana transportasi memegang peranan penting dan sangat diperlukan. Begitupun dalam sistem distribusi Program Raskin, sistem transportasi yang tepat akan menentukan keberhasilan pelaksanaan program.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, salah satunya bersama Kamaria S.E yang merupakan staff Staf Kantor Kelurahan Bontoala Parang yang berusia 42 tahun. Beliau berprofesi

sebagai tenaga kesejahteraan sosial kelurahan yang membantu ibu harmawati dalam tugas sosial terhadap masyarakat sekitar, dimana beliau mengatakan:

pegawai kelurahan akan menghubungi pihak-pihak penerima raskin dan wajib membawa kupon, alurnya Bupati/walikota mengajukan surat permintaan alokasi (SPA) kepada kadivreg/kasubdivreg/kakansilog berdasarkan alokasi pagu raskin dan rumah tangga miskin penerima manfaat raskin disetiap kecamatan atau kelurahan, beras di gudang penyimpanan perum bulog diambil oleh ksatuan kelompok raskin lalu diangkut dan beras raskin diserahkan kepada pelaksana distribusi (satuan kerja di titik pedistribusian yaitu aparat kecamatan atau kelurahan), Pelaksana distribusi menyalurkan beras kepada rumah tangga miskin secara per orang (Kamaria S.E (2/6/2021))

Pernyataan informan tersebut mrngatakan bahwa pengiriman raskin yang dilakukan bupati/walikota sudah terstruktur dengan baik ke masing-masing kecamatan atau kelurahan. Staff bagian kelurahan akan mengambil beras raskin digudang bulog dan akan menginformasikan kepada pihak penerima untuk mengambil beras raskin yang sudah tersedia di kelurahan maupun di toko terdekat.

Proses registrasi pendistribusian KKS dalam melaksanakan program Sembako dilakukan bagi KPM yang baru ditetapkan sebagai

penerima program Bansos Pangan di tahun 2020. KKS yang sudah dimiliki KPM dari program BPNT dan/atau PKH tetap digunakan untuk memperoleh dan memanfaatkan dana bantuan program Sembako.



Gambar 6. Ilustrasi penyaluran bantuan

Kemudian Harmawati Rusly yang merupakan staff Kantor Kelurahan Bontoala sebagai tenaga kesejahteraan sosial kelurahan sekaligus penanggung jawab raskin tingkat kelurahan, menuturkan bahwa:

lokasi penerima program raskin berada di kelurahan bontoala parang kecamatan bontoala kota makassar atau biasanya masyarakat akan mengambil sembako di toko yang telah ditentukan pemerintah. (Harmawati Rusly (29/5/2021))

Selain itu, menurut pedoman umum program sembako 2020 bahwa persiapan distribusi bantuan sebagai berikut.

1. Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/ Kota dan Bank Penyalur melakukan persiapan secara bersama-sama dalam pelaksanaan distribusi KKS serta menetapkan jadwal dan lokasi

pelaksanaan distribusi KKS kepada KPM. Lokasi distribusi KKS harus mudah dijangkau oleh KPM. Jangka waktu distribusi KKS memperhatikan jumlah KPM di suatu lokasi dan kondisi geografis sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial.

2. Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota menugaskan Pendamping Sosial Bansos Pangan dan perangkat desa/aparatur kelurahan di tiap desa/kelurahan untuk mendukung kelancaran proses distribusi KKS oleh Bank Penyalur. Apabila diperlukan, Bank Penyalur dapat menarik tenaga tambahan guna kelancaran proses distribusi KKS.
3. Sebelum pelaksanaan distribusi KKS, Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota menyampaikan informasi kepada KPM terkait kepesertaannya pada program Sembako, waktu dan lokasi distribusi KKS, serta dokumen yang perlu disiapkan dan dibawa oleh KPM pada saat berjalannya distribusi KKS.
4. Sarana penginformasian kepada KPM dapat memanfaatkan media yang biasa digunakan oleh Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota, antara lain: (i) surat yang ditujukan kepada KPM, (ii) informasi dari aparat pemerintah daerah dan Pendamping Sosial Bansos Pangan kepada KPM, dan (iii) informasi pada papan pengumuman atau sarana publikasi lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat khususnya KPM.

5. Perangkat desa/aparatur kelurahan dan Pendamping Sosial Bansos Pangan memastikan KPM hadir pada saat pelaksanaan pendistribusian KKS.

Harmawati juga menjelaskan bahwa dalam penyaluran beras raskin ini ada beberapa tahapan, yaitu:

1. Pihak kelurahan akan menginformasikan nama-nama penerima raskin/bpnt melalui rt/rw
2. Masyarakat akan kekelurahan untuk mengambil kupon
3. Masyarakat akan mengambil sembako di toko yang telah ditentukan pemerintah atau dikantor kelurahan.

Yang saya temui saat observasi sama dengan apa yang ibu harmawati katakan. Masyarakat yang ingin mengambil raskin harus membawa kupon jika ingin mengambil beras. Perkataan saya di kuatkan dengan wawancara dengan ibu salwiah yang mengatakan “jika ingin mengambil raskin wajib membawa kupon”

Sebagai tenaga kesejahteraan social kelurahan yang bertanggung jawab mendistribusikan raskin hingga sampai ke masyarakat mengakui bahwa alur pendistribusian raskin secara singkat bahwa pihak kelurahan akan menginformasikan jadwal pendistribusian raskin dengan memberikan kupon dan masyarakat akan datang mengambil sendiri. Selain itu, dijelaskan juga bahwa patokan harga yang diberi pemerintah senilai Rp. 24.000 dan yang harus

dibayarkan masyarakat seniali Rp. 30.000 (Ibu Harmawati Rusly
29/5/2021)

Terkait dengan apa yang dikatakan oleh informan tersebut bahwa dalam penyaluran pendistribusian program raskin juga memerlukan uang sebesar Rp. 30.000 ribu untuk mengambil beras dikelurahan.

Selain itu, Octapina L. Sembe S.Sos merupakan Staf Kantor Kelurahan Bontoala Parang, bertugas untuk menjalani tugas pemerintahan pengelolaan dan pemberdayaan Rt/Rw diwawancarai pada 3 Juni lalu membenarkan bahwa dalam penyaluran beras raskin ini pembagian raskin akan di infokan jika beras sudah sampai kekelurahan dan wajib membawa kartu.

Dengan hal tersebut, H.Nasrun,S.IP,MJ.Si merupakan Lurah di Kelurahan Bontoala Parang yang diwawancarai pada 3 juni lalu menuturkan bahwa dalam penyaluran bantuan tersebut akan dibagikan langsung oleh TKSK di dampingi oleh staff kelurahan kepada penerima.

Maka dari itu berdasarkan dengan hasil wawancara dan pengamatan yang telah dilakukan, peneliti beranggapan bahwa sistem transportasi yang dilakukan oleh pihak kelurahan sudah tepat. Kelurahan Bontoala Parang melakukan penyaluran pendistribusian sudah memenuhi proses yang dilakukan oleh pemerintah.

4.2.1.2 Ketersediaan Produk

Ketersediaan produk dan harga merupakan salah satu hal yang menjadi pertimbangan konsumen dalam pembelian termasuk dalam sistem penyaluran bantuan. Terkait ketersediaan produk yang dimaksud, maka peneliti merangkum pernyataan beberapa informan yang dapat menjawab indikator pada penelitian ini sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing informan khususnya dalam penyaluran bantuan ini.

Harmawati Rsusly menyatakan bahwa syarat syarat penerima raskin yaitu:

1. Orang tidak mampu
2. Penerima kartu perlindungan sosial (KPS) atau kartu keluarga sejahtera (KKS).
3. Dan harus terdaftar di data DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial)

Kemudian, beliau melanjutkan bahwa:

jumlah penerima manfaat program raskin yaitu sebanyak 93 kepala keluarga dari kelurahan bontoala parang, hingga saat ini belum ada penambahan. Kalaupun dibekalang ada penambahan pasti akan ada informasi, jadi ya ketersediaan beras itu dilihat dari jumlah yang penerima yang sudah didata sebelumnya.

(Harmawati Rsusly 29/5/2021)

Dari hasil wawancara bersama informan, dalam indikator ketersediaan produk ini, hanya menyediakan produk sesuai dengan

jumlah kepala keluarga yang terdata. Jika yang terdata di suatu wilayah hanya terdapat 93 kepala keluarga maka yang disediakan juga berjumlah demikian.

Raskin yang diterima secara teratur dapat menjamin ketersediaan pangan pokok, berupa beras, di rumah tangga tersebut tercukupi secara stabil, sehingga apabila ketersediaan pangan rumah tangga tercukupi diharapkan dapat memperbaiki kondisi rawan pangan rumah tangga berada dalam kondisi tahan pangan (Pedoman Umum Raskin 2015)

Lebih lengkap bahwa Harmawati Rsusly menjelaskan jumlah beras raskin yang diterima per kepala keluarga adalah 1 karung dengan harga yang dipatok Rp. 30.000/karung beras, sedangkan biaya distribusi yang dipatok pemerintah senilai Rp. 24.000.

Ibu Kamera membernarkan apa kata ibu Harmawati bahwa:

penerima beras raskin berjumlah 93 orang dan untuk tahun ini kami dari kelurahan belum penambah jumlah masyarakat yang akan menderima dikarenakan adanya beberapa faktor yang membuat dinas sosial belum menambah data penerima (Kamera S.E 2/6/2021)

Sebagaimana alur distribusi Raskin berdasarkan Pedoman Umum Raskin (2015) sebagai berikut.

Kepala Desa/Lurah/Kepala pemerintahan setingkat memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan Program Raskin di daerahhnya, dan mengadakan Pelaksana Distribusi Raskin di wilayahnya, seperti berikut:

1. Kedudukan Pelaksana Distribusi Raskin berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah/ Pemerintahan setingkat.
2. Pelaksana Distribusi Raskin bertugas untuk memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR, dan menyelesaikan administrasi
3. Fungsi Pelaksana Distribusi yaitu:
 - a) Pemeriksaan dan penerimaan/ penolakan Raskin dari Perum BULOG di TD. Untuk desa/ kelurahan/ pemerintahan setingkat yang TDnya tidak berada di desa/kelurahan/ pemerintahan setingkat, maka petugas yang memeriksa dan menerima/menolak Raskin diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis).
 - b) Pendistribusian dan penyerahan Raskin kepada RTS-PM yang terdapat dalam DPM-1 di Titik Bagi (TB).

- c) Penerimaan HTR Raskin dari RTS-PM secara tunai untuk disetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk oleh Perum BULOG. Apabila tidak tersedia fasilitas perbankan maka dapat disetor langsung secara tunai kepada Perum BULOG.
- d) Penyelesaian administrasi penyaluran Raskin yaitu penanda tangan Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di TD.
- e) Membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai Model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

Penetapan TB dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan antara pemerintah desa/ kelurahan (Pelaksana Distribusi) dengan RTS-PM setempat.

Dari pernyataan di atas jelas disimpulkan bahwa ketersediaan produk oleh kelurahan disesuaikan dengan jumlah masyarakat yang sudah pernah terdata. Sebelumnya, masyarakat akan di data berdasarkan syarat dan ketentuan tertentu karena tidak semua orang bisa masuk dalam kategori penerima program raskin. Sejauh ini, kelurahan Bontoala Parang belum memasukkan data baru untuk menambahkan Kepala Keluarga yang akan diberikan program Raskin.

4.2.1.3 Waktu Penantian

Waktu Penantian dalam proses distribusi bantuan ini dinyatakan dalam penggambaran rentan waktu bantuan di salurkan dan selanjutnya di salurkan Kembali.

Dalam wawancara yang dilakukan di kantor Lurang Bontoala Parang, peneliti menghimpun pernyataan informan yang dapat menggambarkan rentan waktu bantuan di salurkan berdasarkan pada pengalaman yang mereka jalankan selama ini.

Kembali, Harmawati Rsusly menyatakan bahwa:

Waktu pendistribusian raskin di kelurahan bontoala parang tidak menentu dikarena jadwal dari pusat bisa berubah-ubah kadang tanggal muda 5 atau tanggal tua 20, ini yang biasa masyarakat keluhkan. Biasanya yang sebabkan waktu pendistribusian tidak menentu karena masih ada berkas-berkas yang belum dilengkapi, terus dari atas juga lama merespon. Jadi kami di kelurahan tidak bisa apa apa. (Harmawati Rsusly 29/5/2021)

Dan saat itu, beliau akui bahwa penyaluran bantuan ini kadang masih tidak tepat waktu dikarenakan kondisi dan keadaan yang berubah-ubah. Pemerintah kelurahan tidak dapat langsung memberikan instruksi kepada masyarakat karena seala ketentuan distribusi ditentukan oleh kebijakan pusat. Pihak kelurahan hanya bertugas sebagai perantara untuk menyalurkan raskin kepada penerima di

keluarahan itu sendiri. Pemerintah pusat yang menangani raskin dinilai kurang tanggap dalam memberikan respon oleh pemerintah kelurahan sehingga kelurahan hanya bisa menunggu waktu yang ditentukan oleh pemerintah pusat.

Selain itu, Kamaria S.E membenarkan bahwa memang penyaluran bantuan ini tidak tepat waktu.

waktu pendistribusian raskin tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh kelurahan, yang seharusnya diawal bulan sekarang biasa terlambat sampai akhir bulan (Kamaria S.E 2/6/2021)

Dari hasil wawancara, bahwa rentan pembagian Raskin tidak menentu dan sering berubah-ubah.

Sebagaimana menurut Pedoman Umum Raskin (2015) terkait Pelaksanaan Penyaluran Ras-kin Sampai Titik Distribusi (TD), sebagai berikut.

1. Pelaksanaan penyaluran Raskin sampai TD merupakan tugas dan tanggung jawab Perum BULOG.
2. Penyediaan beras untuk RTS-PM Raskin dilaksanakan oleh Perum BULOG dalam kemasan berlogo Perum BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan atau 50 kg/ karung.
3. Rencana Penyaluran Untuk menjamin kelancaran proses penyaluran Raskin, Perum BULOG bersama Tim Koordinasi

Raskin menyusun perencanaan penyaluran bulanan yang diterapkan dalam SPA.

4. Proses Penyaluran

a. Berdasarkan Pagu Raskin, Bupati/ Walikota/ Ketua Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/ Kota atau Pejabat yang dipilih oleh Bupati/ Walikota mengeluarkan SPA kepada Perum BULOG.

b. Berdasarkan SPA, Perum BULOG menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing kecamatan atau desa/kelurahan dengan atau tanpa menunggu peluncuran resmi penyaluran Raskin pada awal tahun.

c. Sesuai dengan SPPB/DO maka Perum BULOG menyalurkan beras sampai ke TD.

d. Sebelum Penyaluran, dapat dilaksanakan pemeriksaan mutu beras oleh Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi di Gudang Perum BULOG, yang ditandatangani oleh Perum BULOG dan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota/Kecamatan/ Pelaksana Distribusi.

Dari hal diatas, ada alur yang begitu Panjang dan harus terpenuhi hingga proses pendistribusian ke titik bagi (wilayah), olehnya itu dibutuhkan komitmen setiap pihak agar melakukan segala mekanisme tepat pada waktunya sehingga tidak

mempengaruhi waktu proses distribusi raskin dan sampai disaat masyarakat membutuhkan (tepat waktu).

Hal ini juga diungkapkan oleh Salwiah yang merupakan penerima beras raskin mengakui bahwa bantuan beras raskin diterima setiap 3 bulan sekali. Dilanjutkan dengan Lela dan Maryani yang cukup mengeluhkan waktu penyaluran bantuan yang berubah-ubah dan tidak menentu.

Dari pernyataan informan yang sudah dipaparkan di atas bahwa waktu penantian merupakan waktu yang dibutuhkan dalam penyaluran kembali beras miskin. Dalam indikator ini, waktu penantian dirasa lamban karena adanya ketidakpastian jadwal oleh pemerintah sehingga waktu penyaluran yang telah ditentukan sebelumnya dapat berubah sewaktu-waktu. Hal tersebut tentu saja memberi dampak terutama bagi masyarakat yang pada awalnya merasa bahwa pembagian program raskin dilaksanakan di awal bulan, sekarang menjadi tidak dapat diperkirakan.

4.2.2 Efektifitas Pelaksanaan Distribusi Bantuan Sosial (RASKIN) Bagi Masyarakat Miskin di Kelurahan Bontoala Parang Kecamatan Bontoala Kota Makassar

4.2.2.1 Kemampuan Adaptasi

Adaptasi diartikan sebagai kemampuan untuk menyesuaikan baik waktu maupun kondisi lingkungan terhadap program yang sedang dijalankan. Hal ini sangat penting untuk dilaksanakan agar

tidak lagi terdapat komunikasi yang *miss* antara pemberi program, pendistribusi dan penerima program. Salwiah, masyarakat Bontoala Parang penerima bantuan beras raskin Ketika ditanyakan oleh peneliti terkait pencapaian tujuan dari penyaluran bantuan ini dengan yakin ia menjawab bahwa belum. Banyak hal yang ia akui dalam penyaluran bantuan ini belum maksimal.(10/6/2021).

Dalam penuturannya, salwiah menjawab peneliti bahwa:

kalau tujuannya pasti untuk meringankan pengeluaran kami yang bisa dibilang tidak mampu, tapi itu kodong waktunya biasa tidak bisa ditebak kapan lagi ini ada sementara habismi berasta, mauki beli uang pas pas. (Ibu Salawiah 10/6/2021).

Kemudian Maryani juga menuturkan secara gamblang bahwa penyampaian bantuan ini tidak tersampaikan dengan baik. Katanya, masih banyak orang-orang yang menerima bantuan ini tapi secara ekonomi masih mampu membeli beras dengan harga normal, dimana ia mengatakan

kurasa masih belum tercapai sekali karena kenapa masih ada orang yang masih bisa beli beras tapi dikasi lagi ini raskin, mungkin salah mendata orangnya atau bagaimana. Karena kadang kita juga ini bingung kenapa si A dapat. (Ibu Maryani 11/6/2021)

Pernyataan tersebut mengartikan bahwa proses penyaluran bantuan raskin ini masih belum tepat sasaran. Hal tersebut dilihat oleh masyarakat karena adanya kesenjangan sosial terhadap masyarakat yang dinilai sudah sejahtera tetapi mendapatkan raskin. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya *update* data oleh pemerintah kelurahan sedangkan sudah ada masyarakat lain yang seharusnya terdaftar menjadi penerima.

Sependapat dengan dua informan sebelumnya, Lela juga menegaskan bahwa penyaluran bantuan ini belum tersampaikan dengan baik. Lagi, alasannya bahwa orang-orang yang didata masih ada yang mampu untuk membeli beras dengan harga normal, sedangkan masih banyak yang membutuhkan, dimana ia memberi pernyataannya,

masih ada masyarakat yang lebih kesusahan untuk dapat ini bantuan, tapi kenapa yang ada (mampu) dapat sedangkan ini yang susah tidak dapat. Saya bersyukur karena dapat program raskin, tapi mereka yang lebih susah, tidak mendapatkan raskin karena pendataan belum berjalan pada tahun ini. (Ibu Lela 10/6/2021)

Pada kesempatan yang lain, peneliti mewawancarai Yandi Idris selaku masyarakat yang juga menerima bantuan raskin bersubsidi ini. Dimana ia mengatakan:

belum tersampaikan dengan baik, masih banyak menurut saya perlu diperbaiki. Seperti waktu yang tidak menentu, kualitas beras yang juga tidak menentu, kadang baik kadang bau dan lain-lain. Tapi, terlepas dari itu, sangat berpengaruh dalam kehidupan kami karena saya kesian tidak mampu. (Bapak Yandi Idris 27/06/2021)

Pernyataan diatas memberi pemahaman bahwa pemerintah kurang memperhatikan bantuan raskin yang diberikan. Meskipun beras yang disalurkan adalah bentuk bantuan sebaiknya pemerintah juga memperhatikan kualitas beras yang diberikan kepada masyarakat. Selain itu, lagi-lagi masyarakat mengeluhkan waktu yang tidak tersistematis yang kemudian berdampak pada ekonomi masyarakat.

Dalam menggambarkan kemampuan adaptasi ini, peneliti menggambarkan dalam pencapaian tujuan dan sasaran terhadap pelaksanaan program raskin ini. Dari hasil wawancara bahwa Sebagian besar masyarakat masih belum merasakan tercapainya tujuan dari pelaksanaan program ini dikarenakan masih banyak yang seharusnya berhak menerima bantuan ini namun tidak terdata. Hal ini lah yang memunculkan polemic social di masyarakat, masih ada rasa ketidakadilan dalam pelaksanaan program ini, masyarakat pun

menduga duga akan hal ini, seperti adanya nepotisme dalam pendataan dan lain sebagainya.

Sebagaimana yang termaktub dalam Pedoman Umum Raskin (2015), bahwa:

A. Program Raskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras.

B. Sasaran Program Raskin Tahun 2015 yaitu berkurangnya beban pengeluaran 15.530.897 RTS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 kg/ RTS/bulan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa kemampuan adaptasi yang dilaksanakan selama ini belum terlaksana dengan baik. Pemerintah kelurahan masih belum melakukan pembaruan pendataan sehingga membuat masyarakat gelisah terkait kapan waktu pendaftaran agar masyarakat miskin bisa terdata. Imbas dari perihal ini yaitu pemerataan penyaluran distribusi raskin menjadi terkendala. Beras tersalurkan kepada orang yang dinilai sudah tidak berhak karena ekonominya yang sudah stabil akibat dari kurang tanggapnya kelurahan untuk mengatasi persoalan ini. Sebagai masyarakat, mereka hanya busa menunggu dan menanti informasi lanjutan mengenai pendataan baru penerima raskin.

4.2.2.2 Kepuasan Kerja

Dalam wawancara mengenai kepuasan kerja, Maryani, Lela dan Salwiah dalam kapasitasnya sebagai masyarakat yang menerima dampak penyaluran bantuan beras raskin ini sepakat bahwa sangat berdampak dalam pemenuhan kehidupan sehari-hari keluarga mereka. Selain itu, Salwiah menambahkan:

kalau Cuma beras tidak terlalu membantu (kurang) seharusnya masyarakat diberi minyak, telur dan lainnya. Karena kita hidup dikota besar begini kesian apa apa dibeli sedangkan pendapatan ta perbulan tidak menentu. Semoga kesian tidak hanya beras saja. (Ibu Salwiah 10/6/2021)

Dari pernyataan informan di atas merasa bahwa masyarakat masih kurang puas jika bantuan yang diberikan hanya beras. Akan tetapi, sampai saat ini pemerintah kelurahan masih belum bisa memastikan bahwa akan ada penambahan bantuan lain selain beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebagian masyarakat dengan pendapatan rendah masih menggantungkan diri dengan bantuan raskin ini.

Ketika peneliti menanyakan lebih lanjut terkait kualitas beras yang disalurkan, Salwiah menyatakan:

80% bagus dan bersih tetapi tidak terlalu putih. Tapi begitumi kadang juga ada yang mengeluh tetangga tetangga yang dapat ada yang bau. Tidak bagus dimasak. Jadi tolong kesian biar ini kita orang tidak mampu setidaknya bisa dipikirkan juga mana yang layak dimasak. (Ibu Salwiah 10/6/2021)

Kemudian diikuti oleh Maryani yang mengatakan:

tidak terlalu bagus, kadang bau, banyak tetangga ku mengeluh kesian. Bisa mungkin pemerintah pilih pilih sedikit yang bisa dimasak. (Ibu Maryani 11/6/2021)

Sedangkan Lela yang berpendapat bahwa beras yang diterima cukup bagus.

Aisyah adalah seorang ibu rumah tangga yang juga berpendapat bahwa:

Penyalurannya tidak sesuai dengan pedoman, kalau waktunya tidak tentu karena biasanya kelurahan memberitaukan tidak sesuai tanggal penyaluran (Aisyah 28/06/2021)

Selain itu, Aisyah menyatakan bahwa pemerintah kelurahan dalam hal ini sangat ramah kepada siapapun dan selalu membantu masyarakat sekitar jika membutuhkan pertolongan.

Dalam hasil wawancara yang telah dilakukan, terkait kepuasan masyarakat akan adanya program ini sangat berpengaruh dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Karena beban pengeluaran biaya dapat sedikit berkurang dengan adanya bantuan raskin ini yang dipatok dengan harga yang cukup murah yaitu Rp. 30.000.

Berdasarkan Pedoman Umum Raskin (2015) yang menjabarkan manfaat pelaksanaan program yaitu:

1. Meningkatkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran, sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan
2. Meningkatkan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD), maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada RTS.
3. Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi.
4. Stabilisasi harga beras di pasaran.
5. Mengendalikan inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp.1.600,-/ kg, dan menjaga stok pangan nasional.
6. Mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa untuk sistem pelayanan publik pemerintah keluarahan sudah berjalan dengan baik karena adanya respon yang

tanggap apabila ada masyarakat yang membutuhkan bantuan. Akan tetapi, sebagian masyarakat masih merasa kurang puas karena kualitas beras yang dirasa masih buruk. Selain itu, kelurahan juga tidak dapat melakukan kebijakan atau mengeluarkan aturan sendiri karena pendistribusian program raskin itu sendiri diatur langsung oleh pusat.

4.2.2.3 Tanggung Jawab

Dalam hal ini, pemenuhan indikator Tanggung jawab digambarkan Kembali dengan pendapat informan yang kedudukannya sebagai masyarakat karena bagaimanapun masyarakat yang menerima dampak dari setiap kebijakan yang diterapkan, termasuk penyaluran raskin ini.

Ketika ditanyai tentang apakah pemerintah setempat dalam proses penyalurannya sudah sesuai dengan pedoman, ia menjawab bahwa:

tidak sesuai karena masih banyak yang sudah mampu mendapatkan beras dan ada yang tidak mampu tidak mendapatkan beras, begitumi tadi kubilang dek, pokoknya banyak mengeluh. Saya menebak ka saja ini mungkin ada juga orang dalam disini. (Ibu Salawiah 10/6/2021)

Kemudian ia melanjutkan pernyataannya;

peran kelurahan bagus dalam penyaluran Cuma ada beberapa bagian pendataan tidak merata dan kalau memang nanti ada pendataan pilihki kepala keluarga yang lebih bagus terima ini bantuan, karena kasian juga kalau ada yang dapat tapi masih bisa dibilang mampu sedangkan itu yang tidak dapat kasian lebih tidak mampu. (10/6/2021)

Mengenai tanggung jawab pemerintah kelurahan, masyarakat berpendapat bahwa belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Raskin disalurkan sesuai dengan data yang tersedia dan terdaftar namun data yang ada tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat. Masyarakat khawatir apabila hal ini menimbulkan kesenjangan sosial yang timbul di masyarakat. Tentu saja karena penerimanya dirasa tidak merata kepada yang membutuhkan, hal ini akan menimbulkan adanya kecurigaan dan kecemburuan sosial masyarakat.

Ketersediaan sumber daya yang memadai untuk melakukan Program Raskin, seperti personel, anggaran/biaya, peralatan dan kewenangan pelaksana kebijakan menurut informan cukup bervariasi. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, ditetapkan tingkat tertentu dan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Selain itu, Lela juga menyatakan bahwa:

tidak, karena raskin yang ditentukan pemerintah 24.000 sementara harga yang diberikan kepada kami 30.000, ini sebenarnya yang paling dibicarakan sama tetangga, kenapa itu katanya ada dikasiki harga murah na pas adami dibayar bukan harga segitu. Kadangkali bingung yang mana mau dipercayai sebenarnya ini. Kalau memang kasian seharga Rp. 24.000, kenapa diminta Rp. 30.000. (Ibu Lela 10/6/2021)

Penjelasan lebih lanjut sejalan dengan hal ini dikatakan bahwa Sumber daya mempunyai peranan yang sangat penting dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo (2011:98) menyatakan bahwa “Implementasi kebijakan tidak akan efektif jika pelaksana kebijakan sebagai penanggung jawab kekurangan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan, terlepas dari seberapa jelas dan konsistennya ketentuan dan aturan, atau seberapa akurat penyampaiannya. Hal ini tergambar dari beberapa pernyataan masyarakat yang di wawancara mengeluhkan adanya ketidaksesuaian antara harga yang dipatok pemerintah dengan Rp. 24.000/karung beras namun yang diberikan kepada masyarakat senilai Rp. 30.000.

Hal tersebut memicu ketidakpercayaan masyarakat dan menduga adanya keuntungan dibalik penyaluran bantuan ini. Oleh karena itu, pemenuhan indikator tanggung jawab ini secara spesifik

membutuhkan komunikasi yang terbuka kepada masyarakat, lebih transparan dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsi aparat dalam proses pendistribusian bantuan.

Pernyataan lain yang dihadirkan dari hasil wawancara informan bahwa kurangnya transparansi harga dari pemerintah kepada masyarakat. Sehingga membuat masyarakat bingung akibat informasi yang simpangsiur dan tidak pasti. Nominal harga yang didengar oleh masyarakat berbeda dengan harga saat masyarakat membeli beras tersebut.

Kepala Desa/Lurah/Kepala pemerintahan setingkat memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan Program Raskin di daerahhnya, dan mengadakan Pelaksana Distribusi Raskin di wilayahnya, seperti berikut:

1. Kedudukan Pelaksana Distribusi Raskin berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah/ Pemerintahan setingkat.
2. Pelaksana Distribusi Raskin bertugas untuk memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR, dan menyelesaikan administrasi
3. Fungsi Pelaksana Distribusi yaitu:
 - a) Pemeriksaan dan penerimaan/ penolakan Raskin dari Perum BULOG di TD. Untuk desa/ kelurahan/ pemerintahan setingkat yang TDnya tidak berada di

desa/kelurahan/ pemerintahan setingkat, maka petugas yang memeriksa dan menerima/menolak

Raskin diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis).

- b) Pendistribusian dan penyerahan Raskin kepada RTS-PM yang terdapat dalam DPM-1 di Titik Bagi (TB).
- c) Penerimaan HTR Raskin dari RTS-PM secara tunai untuk disetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk oleh Perum BULOG. Apabila tidak tersedia fasilitas perbankan maka dapat disetor langsung secara tunai kepada Perum BULOG.
- d) Penyelesaian administrasi penyaluran Raskin yaitu penanda tangan Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di TD.
- e) Membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai Model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa untuk Sistem Tanggung Jawab, kurangnya transparansi harga dari pemerintah kepada masyarakat. Sehingga membuat masyarakat bingung akibat informasi yang simpangsiur dan tidak pasti. Nominal harga yang didengar oleh masyarakat

berbeda dengan harga saat masyarakat membeli beras tersebut. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan adanya kepastian informasi mengenai harga yang seharusnya digunakan sebagai patokan bantuan Raskin.

4.2.2.4 Pencapaian Target

Dalam indikator ini, peneliti mencoba membandingkan informan pihak pemerintah kelurahan dengan masyarakat sebagai penerima manfaat dari bantuan raskin ini.

Setiap kebijakan yang dikeluarkan untuk diterapkan mempunyai sasaran atau target yaitu memberi kesejahteraan. Jika kondisi target terpenuhi dalam implementasi kebijakan, maka akan sama efektifnya dengan kebijakan lainnya. Sebagai bagian dari evaluasi efektivitas implementasi kebijakan, sasaran kebijakan menjadi tolak ukur yang penting. Kita lihat siapa yang ditargetkan untuk menerima kebijakan dalam kasus ini, serta kondisi kesiapan intervensi yang ditargetkan untuk menerimanya..

Dalam wawancara dengan Harmawati Rsusly selaku tenaga kesejahteraan sosial kelurahan/ bagian pendistribusian raskin Ketika ditanyai tentang apakah penerima RASKIN/BPNT di Kelurahan Bontoala Parang sudah tepat sasaran, beliau secara teran-terangan menjawab bahwa:

tidak tepat sasaran dikarenakan ada beberapa masyarakat yang tergolong mampu tetapi masih mendapatkan beras raskin, tapi maaf ini diluar kemampuan kami, karena kami hanya diberi data sekian ya berarti sekian. (Ibu Harmawati Rsusly 29/5/2021)

Kemudian ia menjelaskan juga bahwa kesulitan dalam pelaksanaan kegiatan raskin yaitu adanya beberapa masyarakat yang tidak terima jika mereka tidak mendapatkan program raskin ini. Serta diakui pula bahwa:

pernah ada yang complain/mengeluh, dikarenakan adanya ketidakadilan dalam penyaluran raskin, tapi ya itulah tantangan yang harus dihadapi. Karenakan untuk capai pemerataan pasti tidak mudah. (Ibu Harmawati Rsusly 29/5/2021)

Sementara itu, pertanyaan serupa juga ditujukan kepada Octapiana L. Sembe S.Sos selaku kepala seksi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat menyatakan:

belum tepat sasaran dikarenakan masih banyak yang belum mendapatkan program raskin. (Ibu Maryani seorang janda 10/6/2021)

Kemudian beliau menjelaskan juga bahwa:

ibu maryani mengatakan bahwa jumlah bantuan raskin yang di berikan untuk masyarakat sudah tepat dengan menerapkan 1 karung beras per kepala keluarga. (Ibu Maryani 10/6/2021)

Respon dan kesiapan masyarakat untuk melaksanakan program Raskin. Wawancara ini mengungkapkan bahwa masyarakat senang dengan kebijakan beras miskin pemerintah karena mereka tidak terbebani dengan harga beras di pasar mahal yang jarang dikunjungi atau dibeli. Namun, masih ada orang yang cukup kaya untuk meminta bagian dari beras miskin pemerintah, yang juga dianggap sebagai tindakan menyimpang.

Kemudian Kamaria S.E menambahkan bahwa kesulitan yang dihadapi saat ini adalah banyak masyarakat yang protes karena tidak mendapatkan raskin, kendalannya hampir sama semua yaitu tidak adanya keadilan dalam penyaluran raskin.

Namun, berbeda dengan pendapat yang diutarakan oleh H. Nasrun, S.IP, M.Si selaku Lurah Kelurahan Bontoala Parang menyatakan bahwa:

kadang-kadang tepat sasaran dan kadang-kadang tidak dikarenakan 10% disebabkan tingkat perekonomian yang dulunya miskin karena mereka berusaha sehingga tingkat ekonominya mampu dan itulah yang akan di komunikasikan kepada TKSK dalam hal ini dinas sosial untuk di ganti dengan warga yang tidak mampu lainnya. (Bapak H. Nasrun, S.IP, M.Si (3/6/2021)

Selain itu, beliau meluruskan yang saat ini banyak masyarakat keluhkan terkait banyak kepala keluarga yang belum mendapat jatah raskin, mengatakan bahwa:

ada beberapa masyarakat yang berhak mendapatkan tetapi karena jumlah kuota yang terbatas makanya kelurahan tidak memberikan ke seluruh warganya. (Bapak H. Nasrun, S.IP, M.Si (3/6/2021)

Di waktu berbeda, Salwiah Ketika ditanyai tentang pencapaian target bantuan ini, ia mengatakan bahwa untuk 1 karung beras per kepala keluarga sudah tepat. Begitupun dengan Lela dan Maryani yang menganggap bahwa bantuan raskin ini sudah tepat dengan menerapkan 1 karung beras per kepala keluarga.

Sesuai dengan pedoman Raskin, program Raskin dinilai efektif. Karena penerima program beras miskin yang dituju menerima beras telah sesuai dengan penjatahan pemerintah, tidak ada lagi kendala bagi masyarakat karena telah berjalan sesuai target atau sasaran seperti menurut Pedoman Raskin yaitu seluruh masyarakat atau kelompok sangat miskin. Tetapi masih terdapat masyarakat mampu yang meminta jatah program raskin yang diberikan oleh pemerintah. Tindakan ini merupakan perbuatan menyimpang karena mereka termasuk orang yang berkecukupan sehingga tidak berhak menerimanya. Namun, beberapa masyarakat yang masih

mengecewakan pendataan yang kurang menyentuh masyarakat yang lebih berhak menerima bantuan ini.

Berdasarkan informasi dari beberapa informan diatas diapat dipahami bahwa penyaluran raskin ini belum mencapai target secara maksimal. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan pandangan antara pihak kelurahan dan masyarakat. Masyarakat mengeluhkan persoalan bantuan yang tidak merata kepada seluruh masyarakat miskin yang kemudian dijawab oleh pemerintah dengan alasan jumlah kuota yang terbatas sehingga membuat kelurahan tidak dapat memberikan bantuan raskin secara menyeluruh. Masyarakat memahami bahwa kuota tersebut tidak ditentukan oleh pihak kelurahan, akan tetapi informasi mengenai terbukanya pendataan baru masyarakat miskin seharusnya sudah lama dirancang dan diupayakan oleh pemerintah sehingga tidak ada lagi penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran yang sebenarnya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa:

1. Proses Pendistribusi Bantuan Sosial (RASKIN) Bagi Masyarakat Miskin sudah berjalan sesuai aturannya. Hal ini dikarenakan adanya beberapa indikator yang sudah berjalan dengan semestinya misalnya indikator sistem transportasi distribusi yang berjalan dengan aturan yang pemerintah buat dan indikator ketersediaan produk tetapi untuk indikator waktu penantian belum berjalan dengan baik dikarenakan waktu pelaksanaan program raskin masih terjadi keterlambatan juga menjadi masalah bahwa waktu penantian belum tepat waktu.
2. Pelaksanaan Program Raskin di kelurahan Bontoala Parang tidak berjalan dengan efektif. Ketidakefektifan diakibatkan manfaat yang diharapkan dari keberadaan program raskin tersebut tidak tercapai. Tanggung jawab yang dilakukan oleh kelurahan mengakibatkan kurangnya transparansi harga antara kelurahan dan masyarakat setempat dan Target yang belum maksimal dikarenakan banyaknya masyarakat yang mengeluh tentang persoalan bantuan yang tidak merata kepada seluruh masyarakat miskin yang berada di kelurahan botoala.

5.2 Saran

Dari kesimpulan di atas, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan sejumlah masalah yang telah ditemukan dilapangan, maka peneliti memberikan saran dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Kelurahan Bontoala Parang Perlu memperbaiki sistem waktu pendistribusian dan membuat jadwal kapan pendistribusian dilakukan oleh kelurahan agar masyarakat tau jadwal penerima beras raskin dan tidak menunggu terlalu lama.
2. Kelurahan Bontoala Parang perlu pembaruan dan pengontrolan ulang terhadap pelaksanaan program raskin supaya masyarakat tau manfaat program raskin yang telah dilakukan oleh kelurahan. Dan kelurahan diharapkan untuk menjelaskan transparansi mengenai harga raskin yang diberikan pemerintah dan harga yang kelurahan berikan kepada masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo S. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Aisyah, Dewi Nurul, Herbasuki Nurcahyanto, and R. Slamet Santoso. 2013. "Implementasi Program Beras Miskin (RASKIN) Di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang." Diakses dari *media.neliti.com* pada tanggal 5 desember 2020.
- Alfatih, Andy. 2010. *Implementasi Kebijakan Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Unpad Press.
- Aprianto, Naerul Edwin Kiky. 2016. *Kebijakan Distribusi Dalam Pembangunan Ekonomi Islam*. Depok.
- Astutik, Miki Tri. 2019. "Skripsi Tentang Implementasi Distribusi Beras Miskin Dalam Prinsip Ekonomi Islam." Diakses 2 Desember 2020. [http://digilib.uinsby.ac.id/32495/2/Miki Tri Astutik_G74215080.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/32495/2/Miki%20Tri%20Astutik_G74215080.pdf).
- Badan Pusat Statistika. 2020. "Persentase Penduduk Miskin Maret 2020 Naik Menjadi 9,78 Persen." Diakses 3 Desember 2020. [https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html#:~:text=Jumlah penduduk miskin pada Maret,38 persen pada Maret 2020](https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html#:~:text=Jumlah%20penduduk%20miskin%20pada%20Maret,38%20persen%20pada%20Maret%202020).
- Basrowi, M., and Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Komaria, Djam'an, and Aan. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Kominfo. "Tentang Bantuan Sosial Untuk Rakyat." Diakses 6 Desember 2020. https://kominfo.go.id/content/detail/15708/program-bantuan-sosial-untuk-0Arakyat/0/artikel_gp.
- Kotler, Philip, and Lake Keller. 2007. *Prinsip-Prinsip Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Salemba Empat.
- Matthew, Miles B., and Huberman. 1999. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Moleong. 2006. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja.
- Nisak, Amelia Fitrotun. "Implementasi Kebijakan Beras Miskin Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya." Diakses dari *journal.unair.ac.id* pada 8 desember 2020.

- Pedoman Umum Raskin. 2014. "Pedoman Umum Raskin 2014." Diakses 2 Desember 2020. [http://www.tnp2k.go.id/images/uploads/downloads/Pedum Raskin 2014.pdf](http://www.tnp2k.go.id/images/uploads/downloads/Pedum_Raskin_2014.pdf) .
- . 2015. "Pedoman Umum Raskin 2015." Diakses 2 Desember 2020. [http://www.tnp2k.go.id/images/uploads/downloads/Pedum Raskin 2015 Final.pdf](http://www.tnp2k.go.id/images/uploads/downloads/Pedum_Raskin_2015_Final.pdf) .
- . 2020. "Pedoman Umum Raskin 2020." Diakses 23 Desember 2020. [http://tnp2k.go.id/download/31991Pedoman Umum Program Sembako 2020.pdf](http://tnp2k.go.id/download/31991Pedoman_Umum_Program_Sembako_2020.pdf).
- Ruru, Gideon Kongginawan Burhanuddin Kiyai Jorrie. M. 2015. "Program Beras Miskin (Raskin) Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah." Diakses dari ejournal.unsrat.ac.id pada tanggal 3 desember 2020.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- . 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.
- Supriatna, Encup, and Rira Ristanti. 2018. "Implementasi Kebijakan Program Beras Sejahtera Di Kabupaten Pangandaran." Diakses dari journal.uinsgd.ac.id pada 3 desember 2020.
- Suryadi, Ekoman. 2016. "Implementasi Program Beras Miskin Tahun 2015." Diakses 2 Desember 2020. [http://digilib.unila.ac.id/21433/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf](http://digilib.unila.ac.id/21433/3/SKRIPSI_TANPA_BAB_PEMBAHASAN.pdf).
- Sutopo. 2006. *Penelitian Kualitatif Dasar Teori Dan Terapannya Dalam Penelitian*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Syafi'i, Inu Kencana, and dkk. 2006. *Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Winarno, Budi. 2005. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Press.

Peraturan Perundang-undangan

Intruksi Presiden No.3 tahun 2012. Kebijakan Pengadaan Gabah/Berita dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah

Inpres No 3 Tahun 2007. Tentang Perberasan.

Keputusan Menteri Social Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2013. Tentang Penerapan Kriteria dan Pendekatan Fakir Miskin dan orang Tidak Mampu.

Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 2002. Tentang Ketahan Pangan

Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2003. Tentang Pendirian Perusahaan Umum(perum) Bulog

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012. Tentang Pangan



BOSOWA



Lampiran 1 Matriks pengembangan Instrumen Penelitian

I. Judul Skripsi

IMPLEMENTASI DISTRIBUSI BANTUAN SOSIAL (RASKIN) BAGI MASYARAKAT MISKIN KELURAHAN BONTOALA PARANG KECAMATAN BONTOALA KOTA MAKASSAR.

II. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Proses distribusi bantuan sosial (RASKIN) bagi masyarakat miskin di Kelurahan Bontoala Parang Kecamatan Bontoala Kota Makassar.
2. Bagaimana Efektivitas distribusi bantuan sosial (RASKIN) bagi masyarakat miskin di Kelurahan Bontoala Parang Kecamatan Bontoala Kota Makassar.

III. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana proses distribusi bantuan sosial bagi masyarakat miskin di Kelurahan Bontoala Parang Kecamatan Bontoala Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas distribusi bantuan sosial bagi masyarakat miskin di Kelurahan Bontoala Parang Kecamatan Bontoala Kota Makassar.

IV. Fokus Penelitian

1. Proses distribusi bantuan sosial (RASKIN) bagi masyarakat miskin di Kelurahan Bontoala Parang Kecamatan Bontoala Kota Makassar.
2. Efektivitas distribusi bantuan sosial (RASKIN) bagi masyarakat miskin di Kelurahan Bontoala Parang Kecamatan Bontoala Kota Makassar.

V. Informan Penelitian

1. Internal kelurahan Bontoala Parang
 - a) Pak Lurah
 - b) Staf Kantor Lurah
 - c) Penanggung Jawab Distribusi Tingkat Kelurahan
2. Eksternal Kelurahan Bontoala Parang
 - a) Masyarakat Penerima Beras Miskin

TABEL MATRIKS UNTUK PENGEMBANGAN INSTRUMEN PENELITIAN

NO	Rumusan Masalah	Fokus Penelitian	Indikator	Sumber Informasi	Teknik Pengumpulan Data
1	Bagaimana Proses distribusi bantuan sosial (RASKIN) bagi masyarakat miskin di Kelurahan Bontoala Parang Kecamatan Bontoala Kota Makassar.	Proses distribusi bantuan sosial (RASKIN) bagi masyarakat miskin di Kelurahan Bontoala Parang Kecamatan Bontoala Kota Makassar.	1. Sistem Trnasportasi 2 .Ketersediaan Produk 3. Waktu Penantian	1. Pak Lurah 2. Staf Kantor Lurah 3. Penanggung Jawab Raskin Tingkat Kelurahan	1. Observasi 2. Wawancara 3. Dokumentasi
2	Bagaimana Efektivitas distribusi bantuan sosial (RASKIN) bagi masyarakat miskin di Kelurahan Bontoala Parang Kecamatan Bontoala Kota Makassar.	Efektivitas distribusi bantuan sosial (RASKIN) bagi masyarakat miskin di Kelurahan Bontoala Parang Kecamatan Bontoala Kota Makassar.	1. Kemampuan Adaptasi 2. Kepuasan Kerja 3. Tanggung jawab 4. pencapaian Target	1.Masyarakat Penerima Raskin 2. Masyarakat Tidak Menerima Raskin	1. Observasi 2. Wawancara 3. Dokumentasi

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

IMPLEMENTASI DISTRIBUSI BANTUAN SOSIAL (RASKIN) BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KELURAHAN BONTOALA PARANG LECAMATAN BONTOALA KOTA MAKASSAR.

1. Bagaimana Proses distribusi bantuan sosial (RASKIN) bagi masyarakat miskin di Kelurahan Bontoala Parang Kecamatan Bontoala Kota Makassar.

Yang di Wawancarai :

1. H.NASRUN,S.IP,M.Si
2. HARMAWATI RSUSLY
3. KAMARIA,S.E
4. OKTAPIANA L.SEMBE,S.Sos

Pertanyaan :

- 1) Saluran Distribusi
 - a) Bagaimana sistem pengiriman RASKIN ke Kelurahan Bontoala Parang?
 - b) Pernahka masyarakat penerima manfaat RASKIN mengeluh/komplain mengenai pengiriman/penyaluran raskin?
- 2) Ketersediaan Produk
 - a) Bagaimana upaya yang dilakukan Kelurahan Bontoala Parang dalam dalam membagikan RASKIN ke masyarakat?
 - b) Bagaimana sistem pendistribusian RASKIN?
 - c) Berapakah jumlah penerima manfaat RASKIN di setiap Kelurahan Bontoala Parang Kecamatan Bontoala?
 - d) Berapakah jumlah RASKIN yang diterima Kelurahan Bontoala Parang untuk disalurkan ke Masyarakat?
 - e) Berapakah jumlah RASKIN yang diterima masyarakat penerima manfaat yang diberikan oleh pihak kelurahan?
 - f) Apa saja bentuk uapaya yang dilakukan Kelurahan Bontoala Parang dalam menambah jumlah penerima RASKIN?
 - g) Apakah masih banyak masyarakat yang berhak mendapatkan RASKIN namun tidak terdata?

3) Waktu Penantian

- a) Dimana lokasi perencanaan pembagian RASKIN yang dapat diperoleh masyarakat?
- b) Kapan biasanya waktu pendistribusian RASKIN di Kelurahan Bontoala Parang ditargetkan?
- c) Apakah pelaksanaan distribusi RASKIN sudah tepat waktu?
- d) Apakah penerima subsidi RASKIN di Kelurahan Bontoala Parang sudah tepat sasaran?

2. Bagaimana Efektivitas distribusi bantuan sosial (RASKIN) bagi masyarakat miskin di Kelurahan Bontoala Parang Kecamatan Bontoala Kota Makassar.

Yang di Wawancara yaitu :

1. Masyarakat Penerima Raskin

pertanyaan :

1) Kemampuan Adaptasi

- a) Apakah tujuan RASKIN kepada Bapak/Ibu sudah tersampaikan baik?
- b) Apakah subsidi RASKIN sudah membantu kebutuhan sehari-hari?

2) Kepuasan Kerja

- a) Bagaimana kualitas beras yang diterima?
- b) Bagaimana perubahan yang dirasakan dengan keberadaan program RASKIN?

3) Tanggung Jawab

- a) Apakah penyaluran RASKIN menurut Bapak/ibu sudah sesuai dengan pedoman?
- b) Apakah Bapak/Ibu mendapatkan beras RASKIN?
- c) Apakah Bapak/Ibu mendapatkan RASKIN setiap bulan?

4) Pencapaian Target

- a) Apakah jumlah yang didapatkan sudah tepat?
- b) Bagaimana peran Kelurahan Bontoala Parang dalam penyaluran RASKIN/BPNT tersebut?
- c) Apakah penerima subsidi RASKIN di Kelurahan Bontoala Parang sudah tepat sasaran?

Lampiran 3 Panduan Observasi

PANDUAN OBSERVASI

- I. Observasi Umum Lokasi Penelitian**
 - a. Gambaran Umum Objek Penelitian
 - b. Profil Kantor Lurah Bontoala Parang
- II. Proses distribusi bantuan sosial (RASKIN) bagi masyarakat miskin di Kelurahan Bontoala Parang Kecamatan Bontoala Kota Makassar.**
 - a. Sistem Transportasi
 - b. Ketersediaan Produk
 - c. Waktu Penantian
- III. Efektivitas distribusi bantuan sosial (RASKIN) bagi masyarakat miskin di Kelurahan Bontoala Parang Kecamatan Bontoala Kota Makassar.**
 - a. Kemampuan Adaptasi
 - b. Kepuasan Kerja
 - c. Tanggung Jawab
 - d. Pencapaian Target

Lampiran 4 Data Nama Informan

Nama Informan

No	Nama	Pekerjaan/Bidang
1	H.NASRUN,S.IP,M.Si	LURAH
2	HARMAWATI RSUSLY	TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KELURAHAN/ BAGIAN PENDISTRIBUSIAN RASKIN
3	KAMARIA,S.E	STAFF TKSK DI KELURAHAN BONTOALA PARANG
4	OKTAPINA L.SEMBE,S.Sos	STAFF KELURAHAN BAGIAN PEMERINTAHAN PENGELOLAAN JARINGAN DAN PEMBERDAYAAN RT/RW
5	SALWIAH	IBU RUMAH TANGGA
6	AISYAH	IBU RUMAH TANGGA
7	MARYANI	JANDA 5 ORANG ANAK
8	LELA	WIRASWASTA PENJUAL GORENGAN
9	YANDI IDRIS	BURU HARIAN

Lampiran 5 Hasil Penelitian

HASIL PENELITIAN

1. Bagaimana Proses Distribusi Bantuan Sosial (RASKIN) Bagi Masyarakat Miskin di Kelurahan Bontoala Parang Kecamatan Bontoala Kota Makassar

Indikator :

1. Sistem Transportasi
2. Ketersediaan Produk
3. Waktu Penantian

Pertanyaan	Indikator/ Teori	Wawancara	Observasi	Temuan	Kesimpulan
Bagaimana sistem pengiriman RASKIN ke Kelurahan Bontoala Parang?	Sistem transportasi	“pegawai kelurahan akan menghubungi pihak-pihak penerima raskin dan wajib membawa kupon, alurnya Bupati/walikota mengajukan surat permintaan alokasi (SPA) kepada kadivreg/kasubdivreg/kakanwil berdasarkan alokasi pagu raskin dan rumah tangga miskin penerima manfaat raskin di masing-masing kecamatan atau kelurahan, Satuan kerja raskin mengambil beras di gudang penyimpanan perum bulog dan mengangkut dan menyerahkan beras raskin kepada pelaksana distribusi (satuan kerja di titik distribusi yaitu aparat kecamatan atau kelurahan), Pelaksana distribusi menyerahkan beras kepada rumah tangga miskin secara perorangan” Kamaria S.E (2/6/2021)	Yang saya temui saat observasi sama dengan apa yang ibu Kamaria katakan. Masyarakat yang ingin mengambil raskin harus membawa kupon dan membayar uang sebesar Rp.30.000 ribu jika ingin mengambil beras. Perkataan saya di kuatkan dengan wawancara dengan ibu salwiah yang mengatakan “jika ingin mengambil raskin wajib	Pendistribusian yang dilakukan oleh Kelurahan Bontoala Parang sudah bagus dikarenakan kelurahan mengikuti proses pendistribusian yang telah ditetapkan oleh pemerintah.	sistem transportasi yang dilakukan oleh pihak kelurahan sudah tepat. Kelurahan Bontoala Parang melakukan penyaluran pendistribusian sudah memenuhi proses yang dilakukan oleh pemerintah.

		<p>“Sebagai tenaga kesejahteraan social kelurahan yang bertanggung jawab mendistribusikan raskin hingga sampai ke masyarakat mengakui bahwa secara waktu yang kadang tidak menentu dalam pendistribusian raskin ini. Beliau menjelaskan alur pendistribusian raskin secara singkat bahwa pihak kelurahan akan menginformasikan jadwal pendistribusian raskin dengan memberikan kupon dan masyarakat akan datang mengambil sendiri. Selain itu, dijelaskan juga bahwa patokan harga yang diberi pemerintah senilai Rp. 24.000 dan yang harus dibayarkan masyarakat senilai Rp. 30.000” Ibu Harmawati Rusly (29/5/2021)</p>	membawa kupon dan uang”		
<p>Berapakah jumlah penerima manfaat RASKIN di setiap Kelurahan Bontoala Parang Kecamatan Bontoala?</p>	<p>Ketersediaan Produk</p>	<p>“Sebagai staff tsk di kelurahan bontoala parang /yang membantu ibu harmawati dalam pendistribusian raskin menyatakan bahwa yang menerima raskin ini adalah mereka yang terdata Namanya di dinas social, dan jumlah yang diterima per kepala keluarga adalah 1 karung beras. Untuk kelurahan Bontoala Parang sendiri terdata 93 keluarga yang tidak mampu dengan total jumlah beras persediaan dari pusat adalah 93 karung beras.” Ibu Kamera (2/6/2021)</p>	<p>Yang saya temukan dilapangan dan dengan mewawancarai pak lurah bontoala parang sama dengan apa yang saya temui yaitu penerima program raskin ada 93 orang dan data yang ibu kamera berikan sama dengan data yang pak lurah berikan.</p>	<p>Setiap kepala keluarga berhak atas 1 karung beras. Dan persediaan beras di sesuaikan dengan jumlah kepala keluarga yang terdata. Seperti 93 kepala keluarga yang terdeteksi tidak mampu, maka akan disediakan pula 93 karung beras miskin</p>	<p>ketersediaan produk oleh kelurahan disesuaikan dengan jumlah masyarakat yang sudah pernah terdata. Sebelumnya , masyarakat akan di data berdasarkan syarat dan ketentuan tertentu karena tidak semua orang bisa masuk dalam kategori</p>

					penerima program raskin.
Kapan biasanya waktu pendistribusian RASKIN/BPNT di Kelurahan Bontoala Parang ditargetkan?	Waktu Penantian	“Waktu pendistribusian raskin di kelurahan bontoala parang tidak menentu karena jadwal dari pusat bisa berubah-ubah kadang tanggal muda 5 atau tanggal tua 20, ini yang biasa masyarakat keluhkan. Biasanya yang sebabkan waktu pendistribusian tidak menentu karena masih ada berkas-berkas yang belum dilengkapi, terus dari atas juga lama merespon. Jadi kami di kelurahan tidak bisa apa apa. ” Ibu Harmawati (29/5/2021)	Benar yang dikatakan ibu harmawati bahwa waktu pendistribusian raskin di kelurahan bontoala parang tidak menentu. Seperti yang saya lihat dilapangan kadang pendistribusian dilakukan pada tanggal tua dan ada pun tanggal muda. Perkataan saya di perkuat oleh ibu Lela dan ibu salwia yang mengatakan bahwa waktu pendistribusian beras tidak menentu.	Waktu pengiriman beras yang tidak menentu membuat pendistribusian juga di kelurahan bontoala parang juga ikut terganggu dan pihak kelurahan tidak dapat penyalurkan raskin dengan tepat waktu	waktu penantian dirasa lamban karena adanya ketidakpastian jadwal oleh pemerintah sehingga waktu penyaluran yang telah ditentukan sebelumnya dapat berubah sewaktu-waktu.

2. Bagaimana Efektivitas Distribusi Bantuan Sosial (RASKIN) Bagi Masyarakat Miskin di Kelurahan Bontoala Parang Kecamatan Bontoala Kota Makassar

Indikator :

1. Kemampuan Adaptasi
2. Kepuasan Kerja
3. Tanggung Jawab
4. Pencapaian Target

Pertanyaan	Indikator/Teori	Wawancara	Observasi	Temuan	Kesimpulan
Apakah tujuan RASKIN kepada Bapak/Ibu sudah tersampaikan baik?	Kemampuan Adaptasi	“Tujuan raskin belum tersampaikan dengan baik, masih banyak menurut saya perlu diperbaiki. Seperti waktu yang tidak menentu, kualitas beras yang juga tidak menentu, kadang baik kadang bau dan lain-lain. Tapi, terlepas dari itu, sangat berpengaruh dalam kehidupan kami karena saya kesian tidak mampu.” Yandi Idris (27/06/2021)	Saya melihat tujuan raskin sudah tepat dikarenakan beras raskin sudah mengurangi beban masyarakat miskin walaupun tidak semuanya.	Banyaknya masyarakat yang mengeluh tentang waktu yang tidak menentu yang membuat masyarakat jadi marah dan kesal.	kemampuan adaptasi yang dilakukan selama ini belum berjalan dengan baik.
Bagaimana kualitas beras yang diterima?	Kepuasan Kerja	“80% bagus dan bersih tetapi tidak terlalu putih. Tapi begitumi kadang juga ada	Betul ada beberapa beras yang tidak layak untuk disalurkan	Adanya masyarakat yang mengeluh tentang beras yang tidak	sistem pelayanan publik pemerintah kelurahan sudah

		<p>yang mengeluh tetangga tetangga yang dapat ada yang bau. Tidak bagus dimasak. Jadi tolong kesian biar ini kita orang tidak mampu setidaknya bisa dipikirkan juga mana yang layak dimasak.” Salwiah Ibu Rumah Tangga (10/6/2021)</p>	<p>karena ada beras yang bau dan tidak bersih.</p>	<p>sesuai yang mereka terima, ada beberapa masyarakat yang mengeluh tentang bau beras yang tidak enak dicium dan ada beberapa masyarakat yang mengeluh tentang kebersihan beras yang diterima.</p>	<p>berjalan dengan baik karena adanya respon yang tanggap apabila ada masyarakat yang membutuhkan bantuan. Akan tetapi, sebagian masyarakat masih merasa kurang puas karena kualitas beras yang dirasa masih buruk.</p>
<p>Apakah penyaluran RASKIN menurut Bapak/ibu sudah sesuai dengan pedoman?</p>	<p>Tanggung Jawab</p>	<p>“tidak, karena raskin yang ditentukan pemerintah 24.000 sementara harga yang diberikan kepada kami 30.000, ini sebenarnya yang paling dibicarakan sama tetangga, kenapa itu katanya ada dikasiki harga murah na pas adami dibayar bukan harga segitu. Kadangki bingung yang mana mau dipercayai sebenarnya ini. Kalau memang kasian seharga Rp. 24.000, kenapa diminta Rp. 30.000” Ibu Lela Penjual Gorengan (10/6/2021)</p>	<p>Betul apa yang dikatakan ibu lela kelurahan mematok harga 30.000 untuk masyarakat.</p>	<p>Perbedaan harga yang diberi Pemerintah dengan jumlah yang harus dibayarkan masyarakat</p>	<p>Sistem Tanggung Jawab kurangnya transparansi harga dari pemerintah kepada masyarakat. Sehingga membuat masyarakat bingung akibat informasi yang simpangsiur dan tidak pasti.</p>

<p>Apakah penerima subsidi RASKIN di Kelurahan Bontoala Parang sudah tepat sasaran?</p>	<p>Pencapaian Target</p>	<p>“belum tepat sasaran dikarenakan masih banyak yang belum mendapatkan program raskin.” Ibu Maryani seorang janda (10/6/2021)</p>	<p>Beberapa masyarakat mengeluh tentang program raskin dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum bisa mendapatkan program ini.</p>	<p>Banyaknya masyarakat yang protes karena tidak mendapatkan program raskin.</p>	<p>penyaluran raskin ini belum mencapai target secara maksimal. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan pandangan antara pihak kelurahan dan masyarakat. Masyarakat mengeluhkan persoalan bantuan yang tidak merata kepada seluruh masyarakat miskin</p>
---	---------------------------------	--	---	--	---

Lampiran 6 Surat Keterangan Penelitian Dari Kampus



UNIVERSITAS BOSOWA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Urip Sumoharjo Km. 4, Gd. 1 Lt. 7, Makassar-Sulawesi Selatan 90231

Telp. 0411 452 901 – 452 789 Ext. 123, Faks. 0411 424 568

Email: info@unibos.ac.id, http://www.unibos.ac.id

Nomor : A.118/FSP/UNIBOS/V/2021
Lampiran : 1 (satu) rangkap Proposal Skripsi
Perihal : Permintaan Izin Penelitian Penyusunan Skripsi

**Kepada Yth,
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan
Cq. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
Di-
Kota Makassar**

Dengan hormat,

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/ Penulisan Skripsi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar, maka kami mohon kiranya kepada mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : SARMILA
NIM : 45 17 021 018
Judul penelitian : Implementasi Distribusi Bantuan Sosial (Raskin) Bagi Masyarakat
Miskin Di Kelurahan Bontoala Parang Kecamatan Bontoala Kota
Makassar
Tempat : Kantor Kelurahan Bontoala Parang
Waktu : Mei - Juni 2021

Untuk dapat diberi bantuan dalam memperoleh data dan informasi serta pengambilan data yang diperlukan dalam penyusunan Tugas Akhir/ Penyusunan Skripsi tersebut.

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Makassar, 10 Mei 2021

Dekan Fisip Unibos,

Arief Wicaksono, S.Ip. M.A

Nidn : 09271107602

Tembusan :
1. Arsip

Lampiran 7 Surat Keterangan Penelitian Dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 14641/S.01/PTSP/2021
Lampiran :
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Walikota Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan FISIP Univ. Bosowa Makassar Nomor : A.118/FSP/UNIBOS/V/2021 tanggal 10 Mei 2021 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **SARMILA**
Nomor Pokok : 4517021018
Program Studi : Ilmu Adm. Negara
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo Km. 04, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" **IMPLEMENTASI DISTRIBUSI BANTUAN SOSIAL (RASKIN) BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KELURAHAN BONTOALA PARANG KECAMATAN BONTOALA KOTA MAKASSAR** "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **10 Mei s/d 11 Juni 2021**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan **barcode**.

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 11 Mei 2021

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

Dr. JAYADIN SAS, S.Sos., M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
Nip : 19710501 199803 1 004

Tembusan Yth
1. Dekan FISIP Univ. Bosowa Makassar di Makassar;
2. Bertinggal.

SIMAP PTSP 11-05-2021



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231



Lampiran 8 Surat Keterangan Penelitian Dari Badan Kesatuan Dan Politik

**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111
Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867
Email : Kesbang@makassar.go.id Home page : <http://www.makassar.go.id>

Makassar, 17 Mei 2021

Kepada

Nomor : 070 / 799 -II/BKBPV/2021 Yth. CAMAT BONTOALA
Sifat : KOTA MAKASSAR
Perihal : Izin Penelitian

Di -
MAKASSAR

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 14641/S.01/PTSP/2021, Tanggal 11 Mei 2021. Perihal tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa :

Nama : **SARMILA**
NIM / Jurusan : 4517021018 / Ilmu Adm. Negara
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) Univ. Bosowa
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo Km. 04, Makassar
Judul : **"IMPLEMENTASI DISTRIBUSI BANTUAN SOSIAL (RASKIN) BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KELURAHAN BONTOALA PARANG KECAMATAN BONTOALA KOTA MAKASSAR"**

Bermaksud mengadakan **Penelitian** pada Instansi / Wilayah Bapak/Ibu, dalam rangka **Penyusunan Skripsi** sesuai dengan judul di atas, yang akan dilaksanakan mulai tanggal **17 Mei s/d 11 Juni 2021**.


Demikian disampaikan kepada Bapak untuk dimaklumi dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota Makassar Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.


Drs. AKHMAD NAMSUM, MM
Pangkat: Pembina
NIP : 19670524 200604 1 004

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prop. Sul – Sel. di Makassar;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prov. Sul Sel di Makassar;
3. Dekan FISIP Univ. Bosowa Makassar di Makassar;
4. Mahasiswa yang bersangkutan
5. Arsip

Lampiran 9 Surat Penelitian Dari Kecamatan Bontoala

**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
KECAMATAN BONTOALA**
Jalan Lobak No. 1 Telp 0411 - 442 613 Makassar 90151
Email : Bontoalakecamatan@gmail.com Website : www.kecamatanbontoala.com

Makassar, 24 Mei 2021

Nomor : 070/205/KBTL/V/2021
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada
Yth. **Lurah Bontoala Parang**
Di
Makassar


Berdasarkan Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Tanggal 17 Mei 2021. Nomor : 070/799-II/BKBP/V/2021. Perihal : Izin Penelitian. Maka saudara tersebut di bawah ini :

Nama : **SARMILA**
NIM / Jurusan : 4517021018 / Ilmu Adm. Negara
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) Univ. Bosowa
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo Km. 04, Makassar
Judul : ***"IMPLEMENTASI DISTRIBUSI BANTUAN SOSIAL (RASKIN) BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KELURAHAN BONTOALA PARANG KECAMATAN BONTOALA KOTA MAKASSAR"***

Bermaksud mengadakan *Penelitian* pada Instansi / Wilayah Bapak / Ibu, dalam rangka *Penyusunan Skripsi* sesuai dengan judul di atas, yang akan dilaksanakan mulai tanggal **17 Mei s/d 11 Juni 2021**.


Sehubungan dengan hal tersebut, kiranya Bapak / Ibu dapat memberikan bantuan dan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan dengan catatan 1 (satu) rangkap hasil Pengumpulan Data Penelitian dikirim kepada kami (Kantor Kecamatan Bontoala).


Makassar, 24 Mei 2021
SHAMSUL BAHRI, S.IP
Pangkat : Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19720503 199202 1 002

Tembusan : Kepada Yth.
1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sul – Sel. di Makassar;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prov. Sul – Sel di Makassar;
3. Dekan FISIP Univ.Bosowa Makassar di Makassar;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran 10 Surat Keterangan Selesai Penelitian

**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**
KECAMATAN BONTOALA
KELURAHAN BONTOALA PARANG
Jl.Satangga No.63 Makassar KP 90157

SURAT KETERANGAN
Nomor : 474 / 75 / KBP / VII / 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : H. NASRUN,S.IP., M.S.I
Jabatan : Lurah

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : SARMILA
Nim : 4517021018
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan ilu politik
Perguruan tinggi : Universitas Bosowa

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di kelurahan Bontoala Parang Kecamatan Bontoala
Judul Penelitian : **Implementasi Distribusi bantuan Sosial (RASKIN) Bagi masyarakat miskin di Kelurahan Bontoala Parang Kecamatan Bontoala Kota Makassar** di lingkup Kelurahan Bontoala Parang Kota Makassar
Yang di laksanakan Pada Mei Sampai Juni

Makassar, 14 Juli 2021


H.NASRUN,S.IP.,M.Si.
Pangkat : Penata Tk. 1/III d
NIP : 19660718 200701 1 028

Lampiran 11 Dokumentasi Peneliti

Dokumentasi Dengan Pak Lurah dan Pegawai Kantor Lurah



Dokumentasi Dengan Masyarakat Sekitar

